



## RELEVANSI PENERAPAN GOVERNMENT FINANCE STATISTICS (GFS) DALAM MENILAI KEBIJAKAN FISKAL

Puput Waryanto

Balai Diklat Keuangan Makassar, Indonesia; Email: nataprojo@gmail.com

### INFO ARTIKEL

#### SEJARAH ARTIKEL

Diterima Pertama  
3 Maret 2015

Dinyatakan Dapat Dimuat  
12 Juni 2015

#### KATA KUNCI:

GFS  
Indonesia  
Relevansi  
Penerapan

### ABSTRAK

*The government need to realize Government Finance Statistics (GFS) could be the right choice because a prove that the application of GFS in some countries was relevant to review fiscal policy, by the regression equation  $Y = 1,810 - 0,838X$  where  $X =$  application of the GFS and  $Y =$  fiscal policy. It was negative and significant influence. Factor GFS application could assess fiscal policy by contribution of 81,1%. The preparation of the GFS did not terminate the obligation in preparing financial statements for a common purpose, which was at the level of central government known as LKPP (Government Financial Statements). Use of basic principles which were adequate in the GFS, consist of the accrual basis, coverage of public sector, and consolidation also supported this GFS as a basis for decision making on fiscal policy more precisely than a general purpose financial statements. Differences between GFS with government accounting standards (the general government sector), as well as between the GFS with financial accounting standards (public enterprise sector), ranging from the purpose, scope, reporting entities, criteria for recognition, measurement, revaluation and changes in value, and the integration of current and position, were obstacles and challenges for all parties, especially the central government in charge of developing systems, procedures, and resources needed to develop the GFS in Indonesia.*

Kebutuhan pemerintah untuk menerapkan Government Finance Statistics (GFS) dapat menjadi pilihan yang tepat karena telah terbukti bahwa dengan penerapan GFS pada beberapa negara dapat secara relevan menilai kebijakan fiskal, dalam persamaan regresi  $Y = 1,810 - 0,838X$  di mana  $X =$  penerapan GFS dan  $Y =$  kebijakan fiskal. Pengaruh bersifat negatif dan signifikan. Faktor penerapan GFS dapat menilai kebijakan fiskal dengan kontribusi 81,1%. Adapun penyusunan GFS tidak menggugurkan kewajiban penyusunan laporan keuangan untuk tujuan umum, yang dalam tataran pemerintah pusat dikenal dengan LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat). Penggunaan prinsip-prinsip dasar yang memadai dalam GFS, yaitu basis akrual, cakupan sektor publik, dan konsolidasi juga mendukung GFS ini sebagai dasar yang tepat dalam mengambil kebijakan fiskal dibandingkan dengan sekadar laporan keuangan untuk tujuan umum. Perbedaan antara GFS dengan standar akuntansi pemerintah (pada sektor pemerintahan umum), serta antara GFS dengan standar akuntansi keuangan (pada sektor perusahaan publik), mulai dari tujuan, cakupan, entitas pelaporan, kriteria pengakuan, pengukuran, revaluasi dan perubahan nilai, serta integrasi arus dan posisi, merupakan hambatan sekaligus tantangan bagi semua pihak khususnya pemerintah pusat sebagai penanggung jawab dalam mengembangkan sistem, prosedur, dan sumber daya yang dibutuhkan dalam mengembangkan GFS di Indonesia.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam pemerintahan, kebijakan fiskal memegang peranan yang penting dalam mengatur kestabilan ekonomi nasional. Tentunya, dalam mengambil kebijakan fiskal harus didasari atas pertimbangan sistmatis dan logis berupa informasi yang akurat yang sebagian besar berasal dari laporan keuangan yang disusun dari berbagai sektor, mulai dari sektor pemerintahan umum, hingga sektor korporasi publik. Implikasi kebijakan fiskal dapat dilihat dari struktur pendapatan, pembebanan, arus dan posisi keuangan, serta beberapa indikator penting lainnya yang mencakup semua sektor tersebut. Kebijakan fiskal

akan didasari oleh analisis yang kurang relevan ketika didasari hanya dari laporan keuangan pada sektor umum pemerintahan, karena dampak layanan pemerintah terhadap masyarakat juga diberikan melalui keberadaan korporasi publik, baik korporasi publik keuangan maupun korporasi publik nonkeuangan atas penyediaan barang/jasa publik (IMF, 2014: 1-2).

Selama ini, pemerintah pusat hanya menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) sebagaimana disampaikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa

untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah perlu disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Sehubungan dengan itu, UU Nomor 1 Tahun 2004 lebih lanjut mengamanatkan agar laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual Statistik Keuangan Pemerintah (*Government Finance Statistics/GFS*) sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antarnegara. Dalam penyajian GFS, konsolidasi dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan sektoral, atau fungsi sedangkan kondisi pelaporan keuangan untuk tujuan umum hingga saat ini tidak dapat melakukan konsolidasi sejauh itu. Hal ini bukanlah karena masalah kemampuan, tetapi karena perbedaan tujuan penyusunan laporan keuangan yang belum dicanangkan untuk basis statistik ini.

Sebagai langkah yang baik, pada akhir tahun 2014, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 275/PMK.05/2014 tentang Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia (Mansikapi). Meskipun telah memiliki dasar hukum, dalam menjalankan amanah ini, pemerintah perlu melakukan kajian mendalam mengenai pentingnya implementasi *Government Financial Statistics* ini, karena melihat adanya kebutuhan sarana dan prasarana, serta SDM yang lebih daripada yang ada sekarang. Sistem pelaporan yang mumpuni pastinya, akan menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah bagi Menteri Keuangan karena keterkaitan GFS sangatlah luas, mulai dari Sistem Neraca Nasional yang berbeda dengan Bagan Akun Standar, serta perbedaan prinsip, pengakuan, dan integrasi arus dan posisi.

Dasar pengaturan GFS di berbagai negara, telah ditetapkan oleh IMF melalui GFSM (*Government Finance Statistics Manual*) 2014, yang merupakan bagian dari serangkaian pedoman GFS internasional. GFSM 2014 pembaruan dari GFSM 2001, dan merupakan edisi ketiga dari pedoman yang menggambarkan kerangka statistik makroekonomi secara khusus, yakni kerangka statistik keuangan pemerintah (GFS), yang dirancang untuk mendukung analisis fiskal. Pedoman ini diterbitkan oleh Departemen Statistik IMF dalam rangka memberikan petunjuk dalam pengembangan dan penerapan statistik, dan diterbitkan sebagai bentuk pelayanan kepada seluruh dunia menuju akuntabilitas dan transparansi keuangan. GFSM 2014 digunakan oleh penyusun GFS, analisis fiskal, dan pengguna data fiskal lainnya. Pedoman ini juga menjelaskan hubungan GFS dengan standar akuntansi yang berlaku secara internasional sehingga mungkin berguna bagi pihak yang terlibat dalam mereformasi sistem akuntansi pemerintah. Manual ini terutama fokus pada deskripsi konseptual, klasifikasi, dan pedoman konseptual untuk mengumpulkan dan menguraikan GFS, tetapi tidak menjelaskan metode statistik yang digunakan.

Analisis fiskal terus berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya kompleksitas merumuskan dan mengevaluasi kebijakan fiskal. Secara khusus, globalisasi menuntut penggunaan data yang dapat dibandingkan secara internasional, di saat muncul kekhawatiran tentang kesinambungan fiskal yang meningkatkan permintaan informasi tentang neraca pemerintah dan sektor publik yang lebih luas. GFS merekomendasikan arus dan posisi ekuitas yang terintegrasi, dicatat dengan basis akrual, sedangkan basis kas digunakan untuk menilai kendala likuiditas pemerintah. Hal ini diakui bahwa penerapan sistem terintegrasi GFS akan membutuhkan waktu penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan keadaan negara yang bersangkutan. Secara khusus, banyak negara perlu merevisi sistem akuntansi yang mereka gunakan ke dalam basis akrual. Kebijakan fiskal adalah penggunaan tingkat dan komposisi beban dan pendapatan sektor umum pemerintah dan sektor publik, dan akumulasi yang terkait terhadap aset dan kewajiban pemerintah untuk mencapai tujuan seperti stabilisasi ekonomi, realokasi sumber daya, dan redistribusi pendapatan (IMF, 2014: 404).

Statistik fiskal dapat digunakan untuk menganalisis kapasitas pemerintah; kontribusinya terhadap permintaan agregat, investasi, dan tabungan; dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian, termasuk penggunaan sumber daya, kondisi moneter, dan utang nasional; beban pajak; proteksi tarif; dan jaring pengaman sosial. Selain itu, para analis telah menjadi semakin tertarik pada kebijakan fiskal, defisit struktural, menilai efektivitas pengeluaran pengentasan kemiskinan, kesinambungan kebijakan fiskal, utang bersih, kekayaan bersih, dan klaim kontinjensi terhadap pemerintah, termasuk kewajiban untuk pensiun jaminan sosial.

Beberapa manfaat penerapan GFS ini perlu diteliti lebih lanjut dengan melakukan penelitian atas penerapan GFS ini pada beberapa negara yang telah menerapkan GFS. Dari hasil penelitian, dapat diketahui mengenai relevansi penerapan GFS dalam menilai Kebijakan Fiskal. Dengan demikian, akan menambah keyakinan pemerintah dalam menentukan langkah tepat ke depan dalam memilih menggunakan GFS atau tidak.

Dalam kondisi yang didorong untuk menggunakan GFS, pemerintah RI melalui Kementerian Keuangan telah berusaha menyelaraskan kebutuhan pelaporan keuangan nasional sesuai dengan tuntutan dunia, mengingat kegunaan GFS yang dapat dapat menyentuh level kebijakan fiskal nasional. Oleh karenanya, penulis berusaha melakukan studi komparasi, studi kasus, dan analisis atas berbagai pertanyaan yang muncul:

1. Apakah penerapan GFS bisa dianggap relevan dalam menilai keberhasilan kebijakan fiskal?
2. Bagaimanakah tantangan dan hambatan pemerintah telah menerapkan GFS?

## 2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### 2.1. Government Financial Statistics (GFS)

Evolusi pedoman statistik internasional untuk mengkompilasi GFS dimulai pada awal 1970-an, dengan rancangan GFS Manual. Untuk menampung masukan, draft ini diedarkan dalam bahasa Inggris, Spanyol, dan Perancis kepada pemerintah, bank sentral, kantor statistik pusat, dan organisasi internasional, serta dibahas pada sejumlah seminar regional. Berdasarkan masukan tersebut, GFSM 1986 diterbitkan sebagai panduan untuk mengkompilasi GFS tetapi tidak secara langsung sesuai dengan statistik makroekonomi lainnya.

GFSM 2001 memperbarui pedoman terorganisasi secara internasional untuk menyusun statistik yang diperlukan untuk analisis fiskal yang ditetapkan oleh GFSM 1986. Pedoman yang telah direvisi itu diselaraskan dengan standar yang sesuai dengan pedoman statistik ekonomi makro lainnya yang diakui secara internasional, konsisten dengan tujuan mendukung analisis fiskal. Selain itu, untuk pertama kalinya pedoman direvisi dengan pendekatan korporasi, yang menggunakan neraca terpadu untuk menyusun dan menyajikan GFS.

GFSM 2014 memperbarui pedoman yang diakui secara internasional untuk menyusun statistik yang diperlukan untuk analisis fiskal yang telah ditetapkan oleh GFSM 2001. Revisi diselaraskan dengan update pada panduan dan manual statistik ekonomi makro lainnya, yaitu sistem menyeluruh Sistem Neraca Nasional 2008 (2008 SNA) dan dua manual khusus: Manual Neraca Pembayaran dan Posisi Investasi Internasional (BPM6); dan Manual Statistik Moneter dan Keuangan (MFSM). Pembaruan untuk manual ini merujuk pada 2008 SNA untuk menghindari penafsiran yang berbeda. Untuk masalah yang berhubungan dengan hutang, GFSM 2014 dilengkapi dengan: Statistik Utang Sektor Publik: sebuah Panduan untuk Compiler dan Pengguna (panduan PSDS); dan Statistik Utang Luar Negeri: Panduan untuk *Compiler* dan Pengguna, 2013 (2013 EDS Guide).

Bahasan di dalam GFS sangatlah luas, salah satunya adalah mengenai Gross Operating Balance yang terdapat di dalam Laporan Operasional. Laporan operasional adalah ringkasan transaksi, yang berasal dari interaksi yang disepakati bersama antara unit institusi, pada suatu periode akuntansi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan. Laporan operasional mencatat semua transaksi selama periode akuntansi, yang diklasifikasikan menjadi pendapatan, beban, perolehan aset non-keuangan neto (*net acquisitions of nonfinancial assets*), perolehan aset keuangan neto (*net acquisitions of financial assets*), atau keterjadian kewajiban neto (*net incurrences of liabilities*). Penandingan antara pendapatan dan beban menghasilkan *gross operating balance*.

Sesuai dengan GFS Manual 2014, pendapatan adalah semua transaksi yang meningkatkan kekayaan neto, yang terdiri dari pajak, kontribusi sosial, hibah dan pendapatan lainnya, yang terdiri atas: (1) Pajak

merupakan transfer wajib tanpa imbalan langsung yang diterima oleh sektor pemerintah umum; (2) Kontribusi sosial merupakan pendapatan aktual atau pendapatan yang diperhitungkan skema asuransi sosial dalam rangka penyediaan manfaat asuransi sosial yang terutang; (3) Hibah adalah transfer tidak wajib yang diterima dari pemerintah lain/organisasi internasional dalam bentuk kas dan non-kas (barang/jasa); (4) Pendapatan lain mencakup semua transaksi pendapatan yang tidak diklasifikasikan sebagai pajak, kontribusi sosial atau hibah, yang dapat meliputi penjualan barang dan jasa, bunga dan jenis lain dari pendapatan atas kekayaan, transfer sukarela dalam bentuk kas dan non-kas selain hibah, serta denda dan penalti.

Di dalam laporan operasional, pendapatan dicatat dengan basis akrual. Di dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Kas, pendapatan dan beban dicatat dengan basis kas. Menurut prinsip akrual GFS, pajak penghasilan dan kontribusi sosial merupakan pendapatan yang harus dikaitkan dengan periode dimana pendapatan tersebut diperoleh, meskipun mungkin ada penundaan yang signifikan antara akhir periode pelaporan dan batas tenggang waktu bagi wajib pajak. Secara konseptual, ketika menggunakan basis akrual, waktu antara saat transaksi pendapatan timbul dan pembayaran diterima (atau dibuat dalam kasus restitusi) dijabatani dengan mencatat transaksi aset atau kewajiban keuangan (jurnal penyesuaian).

Beban adalah semua transaksi yang mengurangi kekayaan neto, yang meliputi: (1) Kompensasi pegawai adalah remunerasi dalam bentuk kas atau nonkas yang terutang kepada pegawai sebagai imbalan pekerjaan; (2) Penggunaan barang dan jasa adalah barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi atau diperoleh untuk dijual kembali dikurangi dengan perubahan neto persediaan barang dan jasa tersebut; (3) Penggunaan/konsumsi aset tetap (Penyusutan) adalah penurunan nilai aset tetap selama periode akuntansi sebagai akibat penurunan fisik, kadaluarsa normal, dan kerusakan normal yang tidak disengaja; (4) Bunga adalah beban yang timbul atas penggunaan dana unit lain oleh debitur; (5) Subsidi adalah transfer tahun berjalan yang dibayar oleh unit pemerintah kepada perusahaan dalam rangka memberikan kompensasi atas kerugian operasi, baik berdasarkan tingkat aktivitas produksi atau berdasarkan kuantitas atau nilai barang/jasa yang diproduksi, dijual atau diimpor; (6) Hibah adalah transfer tidak wajib dalam bentuk kas atau non-kas yang dibayarkan ke unit pemerintah umum lainnya atau organisasi internasional. (7) Manfaat sosial adalah transfer tahun berjalan kepada rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan yang timbul atas suatu kejadian seperti sakit, menganggur, pensiun, kebutuhan perumahan atau keadaan keluarga yang dapat dibayarkan dalam kas atau non-kas; (8) Beban lainnya meliputi semua beban yang tidak dapat dimasukkan dalam klasifikasi lain. Pengakuan basis akrual atas beban sejalan dengan pendapatan, jadi akan menerapkan prinsip penandingan waktu yang sama.

Tabel 1. Perbedaan Konseptual

Perbedaan	Government Finance Statistics	Standar Akuntansi Pemerintah
Tujuan	1) Analisis dan evaluasi outcome kebijakan fiskal. 2) Menentukan dampak ekonomi, bandingkan dengan internasional.	Evaluasi kinerja dan posisi keuangan, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan pengguna.
Scope	<b>Sektor pemerintah umum dan sektor publik.</b> Mencatat transaksi dan aktivitas fiskal di luar sektor pemerintah umum.	<b>Pemerintah pusat dan pemerintah daerah.</b> SAP tidak mencakup BUMN/BUMD.
Entitas pelaporan	<b>Unit institusi dan sektor:</b> Unit pelaporan statistik adalah unit institusi: unit yang memiliki kemampuan untuk memiliki aset, memunculkan kewajiban dan terlibat dalam aktivitas ekonomi. Entitas pelaporan dapat berupa unit institusi, namun fokusnya pada kelompok unit institusi. Pengendalian dan sifat aktivitas ekonomi menentukan konsolidasi dan cakupan entitas pelaporan. Sektor pemerintah umum tidak mencakup unit institusi yang bergerak dalam aktivitas pasar.	<b>Entitas ekonomi dan konsolidasi:</b> Unit pelaporan untuk laporan keuangan adalah entitas ekonomi: kelompok entitas yang mencakup satu atau lebih entitas yang dikendalikan. Pengendalian adalah kriteria utama yang menentukan konsolidasi. Entitas pelaporan pemerintah konsolidasian dapat mencakup kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah. Badan Usaha Milik Negara/Daerah menerapkan standar akuntansi keuangan.
Kriteria pengakuan	<b>Pengakuan peristiwa ekonomi:</b> Berdasarkan basis akrual dengan mencatat transaksi pada saat nilai ekonomis terjadi, diubah, ditukar, ditransfer, dan dihapuskan. Dalam rangka mempertahankan simetris antara GFS dan SAP, perbedaan pengakuan diungkapkan dalam memorandum statistik keuangan pemerintah, seperti dalam hal penyisihan piutang tidak tertagih.	<b>Pengakuan peristiwa masa lalu dengan tingkat kemungkinan arus kas keluar:</b> Mengakui kewajiban, termasuk provisi, ketika kejadian ekonomi mas alalu terjadi, jumlahnya dapat diestimasi dengan andal, dan kemungkinan arus kas keluar cukup tinggi. Faktor-faktor tersebut memungkinkan terjadinya pengakuan tanpa melibatkan pihak lain untuk mengakui jumlah yang sama secara simetris.
Pengukuran	<b>Harga pasar terkini:</b> Harga pasar terkini digunakan untuk semua arus dan posisi aset/kewajiban. Penilaian dapat dilakukan dengan metode penilaian alternatif jika tidak tersedia pasar aktif.	<b>Nilai wajar, harga perlehan, dan dasar lain:</b> Aset dan kewajiban yang sejenis dinilai secara konsisten dengan pengungkapan dasar penilaiannya. Dalam SAP, aset dinilai dengan harga perolehan sedangkan utang dinilai menurut jumlah yang harus dibayar pemerintah ketika jatuh tempo. Perbedaan dengan nilai wajar diungkapkan.
Revaluasi dan perubahan nilai	<b>Semua revaluasi dan perubahan volume dicatat dalam laporan arus ekonomi lainnya:</b> Pemisahan berguna untuk analisis fiskal, berdasarkan revaluasi dan perubahan volume yang tidak terkait langsung dengan keputusan kebijakan fiskal yang berada dalam kendali pemerintah. GFS memisahkan antara perubahan nilai dan volume.	<b>Keuntungan dan kerugian yang direalisasikan dan belum direalisasikan:</b> Sebagian keuntungan/kerugian karena revaluasi atau perubahan volume dilaporkan dalam laporan kinerja keuangan dan laporan perubahan aset neto/ekuitas. Sebagian lagi sama sekali tidak dilaporkan.
Integrasi arus dan posisi	GFS mencakup pencatatan yang komprehensif atas transaksi dan arus ekonomi lainnya sehingga tercipta integrasi penuh arus dan posisi serta rekonsiliasi perbedaan antara neraca awal dan akhir periode.	SAP mencakup pencatatan yang komprehensif atas transaksi, sehingga tercipta integrasi penuh arus dan posisi serta rekonsiliasi perbedaan antara neraca awal dan akhir periode. Pengertian transaksi dalam SAP mencakup arus ekonomi lainnya dalam GFS.

Sumber: diolah dari Mansikapi, 2015

Berbagai bentuk laporan keuangan yang dihasilkan dalam GFS serta keterkaitannya antarlaporan tersebut, dapat dilihat dalam lampiran 1. Sumber informasi utama untuk mengkompilasi Statistik Keuangan Pemerintah adalah sistem akuntansi dan pelaporan yang dikembangkan berdasarkan standar akuntansi. Konsep akuntansi dalam standar akuntansi berbasis akrual pada umumnya konsisten dengan konsep yang diterapkan dalam Statistik Keuangan Pemerintah. Namun

demikian, terdapat beberapa perbedaan yang tidak dapat dihindari antara statistik keuangan pemerintah dan standar akuntansi pemerintahan.

Statistik keuangan pemerintah memiliki kesamaan dengan standar akuntansi pemerintahan dalam hal aturan, konsep dan prosedur akuntansi. Sistem akuntansi berbasis akrual yang komprehensif meningkatkan kualitas sumber data yang dipergunakan dalam statistik keuangan pemerintah. Pemerintah dapat mengembangkan bagan akun

standar yang dapat secara efektif menghasilkan data yang diperlukan dalam akuntansi dan statistik keuangan pemerintah. Perbedaan antara standar akuntansi pemerintahan dan statistik keuangan pemerintah terdiri dari: perbedaan konseptual, dan perbedaan penyajian dan istilah. Perbedaan konseptual disajikan dalam tabel 1.

Perbedaan penyajian dan istilah terdiri dari:

1. Perbedaan nama akun yang serupa yang digunakan dalam SAP dan Statistik Keuangan Pemerintah.
2. Jenis struktur klasifikasi dalam neraca, laporan operasional dan laporan arus kas.
3. Statistik Keuangan Pemerintah menetapkan tingkat detail minimum atas bagan akun standar komprehensif yang dilaporkan dalam laporan statistik keuangan pemerintah, sedangkan standar akuntansi pemerintah menetapkan bagan akun standar minimum dengan memberikan prinsip dan panduan untuk akun turunan yang dilaporkan dalam laporan keuangan.
4. Cara pengungkapan informasi yang berbeda dalam dua kerangka pelaporan tersebut.
5. Definisi dan/atau nilai total akun yang berbeda.

## 2.2. Landasan Penerapan GFS di Indonesia

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah perlu disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Sehubungan dengan itu, UU Nomor 1 Tahun 2004 lebih lanjut mengamanatkan agar laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual Statistik Keuangan Pemerintah (*Government Finance Statistics/GFS*) sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antar negara.

Penjelasan UU No. 23 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2007 menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan negara dan upaya perbaikan untuk menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK, selain yang diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut, Pemerintah perlu melakukan beberapa hal berikut sebagaimana direkomendasikan oleh DPR, yaitu antara lain agar Pemerintah meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah daerah sehingga dalam jangka panjang dapat menyajikan laporan statistik keuangan pemerintah (*Government Finance Statistics*).

Laporan hasil reviu BPK atas pelaksanaan transparansi fiskal tahun 2010 meng-highlight signifikansi dari statistik keuangan pemerintah melalui reviu atas unsur transparansi fiskal:

Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab, di mana BPK mereviu bahwa peraturan yang mengatur peran dan fungsi lembaga pemerintahan, dan antar lembaga

pemerintah dan sektor publik dan swasta telah diatur. Namun fungsi pemerintah secara keseluruhan belum terlihat karena laporan LKPD yang belum terintegrasi dengan LKPP.

Ketersediaan Informasi bagi Publik, di mana BPK mereviu bahwa secara umum pemerintah telah melakukan upaya untuk berkomitmen dalam menyediakan informasi fiskal kepada publik. Namun, pemerintah belum sepenuhnya dapat menyajikan informasi fiskal mengenai, antara lain, integrasi posisi fiskal nasional (gabungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat merupakan konsolidasi dari laporan keuangan kementerian/lembaga, namun belum termasuk laporan keuangan pemerintah daerah.

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menerbitkan PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menggantikan PP 24 tahun 2005. Pasal 6 ayat (2) PP Nomor 71 Tahun 2010 mengatur bahwa pemerintah menyusun Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah yang akan menjadi acuan untuk penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah pusat dan daerah, yang diperlukan dalam rangka mewujudkan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah secara nasional.

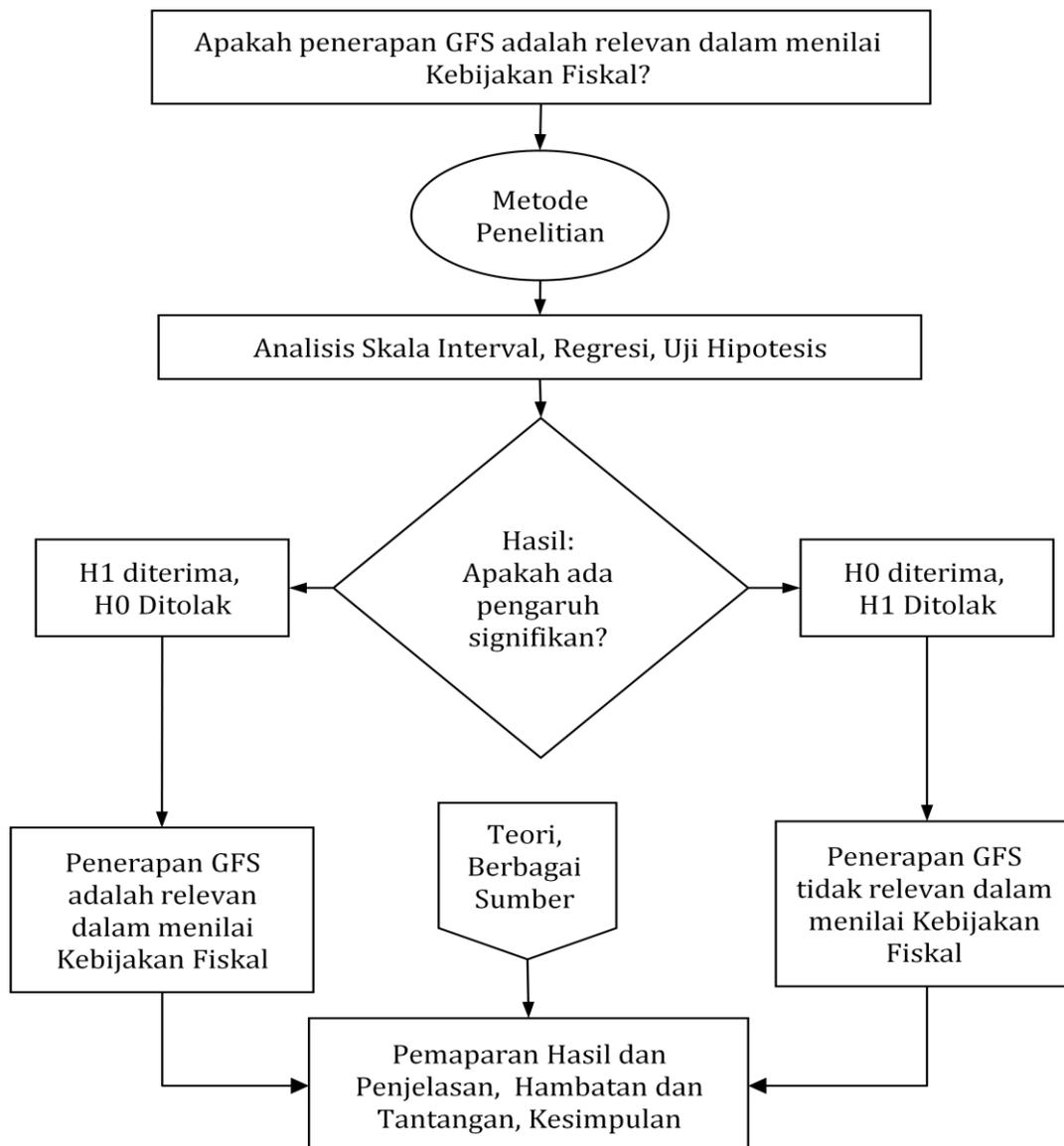
Dalam rangka pelaksanaan tugas Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Representasi Kementerian Keuangan di daerah di bidang pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang antara lain mengamanatkan Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian Pusat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah tingkat wilayah. Sejalan dengan itu, Ditjen Perbendaharaan telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-41/PB/2013 tanggal 12 November 2013 tentang petunjuk teknis penyusunan laporan keuangan pemerintah konsolidasian tingkat wilayah dan laporan GFS tingkat wilayah dalam rangka memberikan pedoman bagi Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun laporan dimaksud.

Selanjutnya, dalam menciptakan kepastian hukum tentang penerapan GFS di Indonesia, dengan mengadopsi GFS Manual 2014, Menteri Keuangan telah menetapkan PMK Nomor 275/PMK.05/2014 tentang Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia (Mansikapi). Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan ini mengikuti beberap dasar hukum sebelumnya yang mendorong penyusunan GFS, serta rekomendasi dari IMF.

## 2.3. Kebijakan Fiskal

Barron, et. al. (1988: 552) menyatakan bahwa kebijakan fiskal adalah tindakan nyata pemerintah untuk mempengaruhi ekonomi ke arah tertentu, dengan cara memanipulasi pajak, pengeluaran pemerintah, atau kedua-duanya. Jika digambarkan secara keseluruhan, di mana pajak merupakan

Gambar 1. Kerangka Pikir



pendapatan dan pengeluaran pemerintah adalah beban, maka kerangka kinerja yang menjadi bahasan utama kebijakan fiskal adalah pendapatan dan beban (dalam basis akrual) atau pemasukan dan pengeluaran (dalam basis kas). Sebagai institusi publik, negara harus melibatkan masyarakat, dalam artian bahwa kebijakan pemasukan diharapkan dapat dioptimalkan dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat.

Dari sudut ekonomi makro, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi dua yaitu Kebijakan Fiskal Ekspansif dan Kebijakan Fiskal Kontraktif. Kebijakan Fiskal Ekspansif adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah, pada saat munculnya kontraksional *gap*. Konstraksional *gap* adalah suatu kondisi dimana output potensial ( $Y_f$ ) lebih tinggi dibandingkan dengan output aktual ( $Y_1$ ). Pada saat terjadi kontraksional *gap* ini kondisi perekonomian ditandai oleh tingginya tingkat

pengangguran. Kebijakan ekspansif dilakukan dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah ( $G$ ) atau menurunkan pajak ( $T$ ) untuk meningkatkan output ( $Y$ ).

Kebijakan Fiskal Kontraktif adalah kebijakan pemerintah dengan cara menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (*overheating*) untuk menurunkan tekanan permintaan pada saat munculnya ekspansional *gap*. Ekspansional *gap* adalah suatu kondisi dimana output potensial ( $Y_f$ ) lebih kecil dibandingkan dengan output aktual ( $Y_1$ ). Kebijakan ekspansif dilakukan dengan cara menurunkan pengeluaran pemerintah ( $G$ ) atau menaikkan pajak ( $T$ ) untuk mengurangi output ( $Y$ ).

Kebijakan Fiskal merupakan suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum. Dalam literatur klasik, terdapat beberapa perbedaan pandangan mengenai kebijakan fiskal, terutama menurut teori Keynes dan teori klasik tradisional menurut Nopirin (2000). Pada prinsipnya Keynes berpendapat bahwa kebijakan fiskal lebih besar pengaruhnya terhadap output daripada kebijakan moneter.

Kebijakan fiskal merupakan salah satu tugas Menteri Keuangan karena sesuai Pasal 8 UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan, mempunyai tugas: a) menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro; b) menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN; c) mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran; d) melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan; e) melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang; f) melaksanakan fungsi bendahara umum negara; g) menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN; h) melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang.

Untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal yang telah dilakukan oleh menteri keuangan telah tepat, perlu diketahui mengenai tujuan dari kebijakan fiskal, yaitu sebagai berikut: 1) Mencapai stabilitas perekonomian, 2) Memacu dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, 3) Memperluas dan menciptakan lapangan kerja, 4) Menciptakan terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat, dan 5) Mewujudkan pendistribusian dan pemerataan pendapatan.

Dari tujuan ini, penulis dapat menarik sebuah kesimpulan dalam rangka pemilihan faktor, bahwa kebijakan fiskal dapat dijelaskan oleh Kesenambungan Fiskal karena dapat menggambarkan keadaan fiskal yang stabil dan baik. Ayumu Yamauchi (2004) berpendapat bahwa kesinambungan fiskal akan terjadi jika nilai sekarang (present value) dari kendala pengeluaran (expenditure constraint) yang akan datang dapat dipenuhi tanpa harus melakukan koreksi atau penyesuaian fiskal untuk mencapai keseimbangan.

Joseph Ntamungiro (2004) menekankan bahwa fiskal akan aman jika terdapat kestabilan rasio utang terhadap PDB. Sementara itu, Edwards (2002) berpendapat bahwa fiskal akan stabil bila rasio utang terhadap PDB bersifat stasioner. Di dalam laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2013, dijelaskan bahwa salah satu indikator kesinambungan fiskal adalah rasio utang terhadap PDB (Produk Domestik Bruto). Kesenambungan fiskal yang baik adalah yang stabil dari tahun ke tahun, yang menunjukkan bahwa

besaran defisit anggaran selalu sebanding dengan PDB yang ditopang.

#### 2.4. Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai relevansi penerapan GFS dalam menilai Kebijakan Fiskal merupakan hal yang masih awal sehingga penulis tidak dapat memperoleh hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Oleh karena itu, dengan keterbatasan yang ada, penulis menyusun penelitian ini. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih perlu dikembangkan melalui penelitian-penelitian selanjutnya, dengan tetap memperhatikan kemanfaatan bagi semua pihak yang berkaitan, terutama pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat, dan Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal.

#### 2.5. Hipotesis Penelitian

Atas dasar tinjauan literatur yang dipaparkan sebelumnya, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H0 : Penerapan Government Finance Statistics adalah tidak relevan dalam menilai Kebijakan Fiskal.

H1 : Penerapan Government Finance Statistics adalah relevan dalam menilai Kebijakan Fiskal

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah unit institusional pada negara-negara yang telah menerapkan *Government Finance Statistics*. Sampel yang dipilih adalah unit institusional sektor publik pada negara-negara yang telah menyusun laporan Government Finance Statistics pada tahun 2008 s.d. 2012 (5 tahun). Penulis melakukan pengambilan data untuk keperluan penelitian berupa unit institusional sektor publik pada 26 negara. Data mengenai penerapan *Government Finance Statistics* diperoleh dari *International Monetary Fund (IMF)* sedangkan data mengenai Kebijakan Fiskal diperoleh dari *World Bank*.

#### 3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

##### 1. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan meninjau literatur-literatur yang telah ada dan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Literatur-literatur tersebut berupa buku cetak, jurnal, skripsi, situs internet, dan sebagainya. Tujuan dari studi literatur menurut Iskandar (2008) adalah untuk menjelaskan, membedakan, meramal dan mengendalikan fenomena-fenomena atau gejala-gejala yang berhubungan dengan masalah penelitian.

##### 2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mengikhtisarkan seluruh data sekunder terkait penelitian yang diperoleh dari sumber data baik berupa data yang dipublikasikan maupun data yang tidak dipublikasikan.

### 3.3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data kuantitatif. Data terkait penerapan *Government Financial Statistics* yaitu *Gross Operating Balance* dan *Debt to GNP Ratio* pada beberapa negara yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari publikasi internet *International Monetary Fund (IMF)* dan *World Bank*.

### 3.4. Metode Analisis dan Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 variabel penelitian yang terdiri atas 1 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Dalam penelitian ini, penulis telah menetapkan variabel bebas dan variabel terikatnya, yakni:

Variabel terikat berupa Kebijakan Fiskal. Variabel ini dijelaskan oleh Kesenambungan Fiskal. Adapun penulis memilih variabel tersebut sebagai variabel terikat di dalam penyusunan ini karena penulis menganggap Kesenambungan Fiskal memegang peranan penting dan diperkirakan merupakan hasil dari kebijakan fiskal dalam sebuah negara, sebagaimana dijelaskan di dalam landasan teori, bahwa kebijakan fiskal bertujuan 1) Mencapai stabilitas perekonomian, 2) Memacu dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, 3) Memperluas dan menciptakan lapangan kerja, 4) Menciptakan terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat, dan 5) Mewujudkan pendistribusian dan pemerataan pendapatan. Kesenambungan fiskal dapat merepresentasikan hasil kebijakan fiskal melalui rasio utang terhadap PDB. Joseph Ntamatungiro (2004) menekankan bahwa fiskal akan aman jika terdapat kestabilan rasio utang terhadap PDB. Sementara itu, Edwards (2002) berpendapat bahwa fiskal akan stabil bila rasio utang terhadap PDB bersifat stasioner.

Variabel bebas berupa Penerapan GFS. Penerapan GFS secara kuantitatif dapat diperkirakan dari *Gross Operating Balance* yang terdapat di dalam Laporan Operasional, komponen utama dalam *Government Finance Statistics (GFS)*. *Gross Operating Balance* ini mencerminkan kemampuan fiskal pemerintah dalam menghasilkan nilai tambah dalam kegiatan operasionalnya, karena merupakan hasil pengurangan beban terhadap pendapatan dalam satu tahun fiskal. Dalam kerangka penelitian ini, ibaratnya penulis membandingkan antara pendapatan negara menurut GFS terhadap kestabilan ekonomi negaranya.

Untuk memudahkan pemahaman mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, tabel 2 menyajikan secara ringkas definisi operasional variabel tersebut.

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Bentuk Variabel	Satuan
Penerapan GFS	<i>Gross Operating Balance</i>	Persen
Kebijakan Fiskal	Kesenambungan Fiskal, melalui <i>Debt to GDP Ratio</i>	Nilai interval

Sumber: data diolah

### 3.5. Model Analisis

#### 3.5.1. Analisis Skala Interval

Analisis skala Interval yaitu suatu skala yang mempunyai rentangan konstan antara tingkat satu dengan yang aslinya, tetapi tidak mempunyai angka 0 mutlak (Irianto, 2004: 19). Untuk menyederhanakan analisis data, penulis melakukan analisis skala interval pada variabel Kebijakan Fiskal karena rentang data yang dianalisis terlalu jauh. Variabel Kebijakan Fiskal dibagi ke dalam interval yang ditentukan dengan cara:

- 1.1 Data yang dilakukan analisis skala interval adalah data rata-rata *Debt to GDP Ratio* yang telah diselisihkan dengan rata-rata *Debt to GDP Ratio* tahun 2008-2012.
- 1.2 Interval ditentukan untuk setiap penyimpangan 2,6 persen, dengan pertimbangan bahwa pengelompokan dilakukan atas 5 kelas data pada interval penyimpangan 0-13%.
- 1.3 Setiap interval memiliki bobot 1 lebih besar dari interval sebelumnya. Semakin kecil selisih terhadap rata-rata, fiskal makin berkesinambungan/stabil dan mendapatkan bobot terbesar.

#### 3.5.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik penting dilakukan untuk menghasilkan estimator yang linier tidak bias dengan varian yang minimum (*Best Linier Unbiased Estimator*), yang berarti model regresi tidak mengandung masalah. Karena penulis akan menggunakan regresi linier sederhana, Uji Asumsi Klasik yang penulis gunakan hanya Uji Normalitas.

Menurut Imam Ghazali (2007 :110) tujuan dari uji normalitas adalah sebagai berikut:

“Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan pengujian-pengujian variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid dan statistik parametrik tidak dapat digunakan.”

Uji statistik yang digunakan untuk uji normalitas data dalam penelitian ini adalah uji normalitas atau sampel Kolmogorov-Smirnov. Penulis menggunakan bantuan Aplikasi SPSS 18 dalam melakukan Uji Normalitas. Jika hasil pengujian menunjukkan bahwa Sig. > 0,05 maka data yang diuji berdistribusi normal.

#### 3.5.3. Analisis Regresi

Alat uji statistik yang dipergunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier (*Regression Analysis*) yaitu untuk menguji pengaruh variabel bebas (Penerapan GFS) terhadap variabel terikat (Kebijakan Fiskal). Analisis regresi linier dipergunakan karena variabel terikat yang dicari dipengaruhi variabel bebas. Regresi linier sederhana menggunakan model persamaan sebagai berikut (Sugiyono, 2010) :

$$y = a + bx + e$$

Keterangan:

x : Penerapan GFS; y : Kebijakan Fiskal;  
a : Intercept/Konstanta; b : Koefisien regresi  
Penerapan GFS; e : error term atau faktor-faktor lain

Penerapan GFS dapat secara relevan menilai  
Kebijakan Fiskal.

Nilai  $F_{hitung}$  dapat diperoleh dengan menggunakan  
rumus : (Sugiyono, 2010)

$$F_{hitung} = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

Di mana:

$R^2$  = Koefisien korelasi

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah anggota sampel

### 3.5.4. Pengujian Hipotesis

Dalam menguji hipotesis, penulis menggunakan Uji F saja karena hanya menggunakan 1 variabel bebas. Uji F ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas (x) yaitu penerapan GFS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (y) yaitu Kebijakan Fiskal. Tujuannya adalah untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak. Model hipotesis yang digunakan dalam uji F ini adalah:

- 1)  $H_0: b = 0$  (artinya Penerapan GFS tidak relevan dalam menilai Kebijakan Fiskal).
- 2)  $H_1: b \neq 0$  (artinya Penerapan GFS dapat secara relevan menilai Kebijakan Fiskal).

Nilai  $F_{hitung}$  akan dibandingkan dengan nilai  $F_{tabel}$ . Kriteria pengambilan keputusan yaitu :

- 1) Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau nilai sig > 0,05, maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak berarti Penerapan GFS tidak relevan dalam menilai Kebijakan Fiskal.
- 2) Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau nilai sig < 0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima berarti artinya

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Analisis Skala Interval

Sesuai dengan operasionalisasi variabel, penulis melakukan pemetaan data variabel sebagaimana ditayangkan dalam tabel 3.

Dalam penelitian ini, penulis akan membandingkan pengaruh antara penerapan GFS dalam menilai Kebijakan Fiskal. Data operasionalisasi variabel pada tabel 3, diolah untuk mendapatkan data variabel yang dibutuhkan. Data variabel kebijakan fiskal perlu dicari dari data Kesenambungan Fiskal berupa *Debt to GDP Ratio*, sedangkan data variabel Penerapan GFS sudah tersedia dari data *Gross*

Tabel 3. Data Operasionalisasi Variabel

No.	Countries	Gross Operating Balance (Persentase Terhadap GDP)					Debt to GDP Ratio				
		2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012
1	Austria	0,102622795	-2,938585901	-3,405738148	-1,45289874	-1,580651445	63,8	69,2	71,8	72,3	74,3
2	Belgium	0,509865287	-3,934756828	-2,288451483	-2,166099786	-2,296215894	89,3	95,7	95,6	97,8	99
3	Cyprus	4,015270735	-1,910011689	-1,501215105	-2,780543467	-3,933928511	48,9	58,5	61,5	71,6	87,3
4	Finland	6,849787257	0,139277383	-0,298784718	1,497795956	0,410189758	33,9	43,5	48,6	49,1	52,6
5	France	0,051818729	-3,966414537	-3,869456646	-2,083995353	-1,67876382	68,2	79,2	82,3	86	90
6	Germany	1,442934277	-1,404396114	-2,75174821	0,796233337	1,582452839	66,9	74,7	82,4	80,6	83
7	Greece	-6,083650092	-12,32866007	-8,482040816	-8,239058101	-7,13587422	112,6	129	144,6	165,4	170,7
8	Ireland	-1,812373241	-9,752685678	-26,12535725	-10,06737934	-5,873889176	44,5	64,9	92,2	106,5	117,7
9	Italy	-0,439807968	-2,880680655	-2,246417275	-1,921825879	-1,004444919	105,7	116	118,6	120,1	126,3
10	Luxembourg	6,548573619	3,278061556	3,354643913	3,891599622	3,260322082	13,7	14,8	19,1	18,2	21,7
11	Malta	-2,214861657	-1,620737551	-1,362159301	-0,254365783	-0,645092107	62,2	67,8	69,1	71,6	71,8
12	Netherlands	3,743752076	-1,705953821	-1,464229409	-1,033591559	-0,750741862	58,5	60,8	62,9	65,2	68,2
13	Portugal	-1,704193028	-7,058527543	-6,045742351	-1,701019482	-4,95962308	71,6	83,1	93,3	107,8	119,1
14	Slovak Republic	-0,375845067	-5,732073446	-5,058861223	-2,705985684	-2,615606739	27,9	35,6	41,1	43,3	46,3
15	Spain	-0,358801531	-6,518233938	-5,587785237	-6,730018436	-8,831521871	40,2	53,9	61,3	69,1	90,7
16	Australia	4,263476162	-0,08675551	-1,423258415	-1,064929341	-0,822015028	11,8	16,9	20,5	24,2	27,1
17	Canada	3,667069024	0,003521322	-0,206502482	0,5406799	0,871828599	71,3	83,3	85,1	85,4	87,5
18	Hong Kong	1,425949734	2,021210931	5,32202541	5,189564901	4,892840778	30,6	33,2	34,6	33,8	33,1
19	Denmark	5,253395028	-0,678283747	-0,512087143	0,116030323	-1,373425023	41,9	40,6	42,9	44,1	47,1
20	Iceland	-9,063022529	-6,435257577	-7,154620592	-3,745621596	-1,804821013	70,3	88,2	92,8	99,2	94,2
21	Israel	-1,730983316	-4,716650359	-3,132746638	-2,354120221	-3,629973029	77	79,4	76	74,1	73,3
22	Japan	0,094585559	-5,155123772	-4,932996987	-5,366033144	-5,326875028	191,8	210,2	215,3	229,6	236,6
23	Norway	21,815811	14,03550306	14,23180595	16,45968908	16,77355037	54,3	48,9	49,6	49,6	49,6
24	Sweden	5,160658112	2,332385641	3,267085759	3,260870502	2,980244296	38,4	42	38,8	37,9	37,1
25	United Kingdom	-2,764778704	-8,715293726	-7,658915668	-5,612852056	-4,027296965	52,2	68	75	81,8	88,7
26	United States	-3,269338234	-8,678298532	-8,123279249	-6,99835835	-5,824359732	76,1	89,7	98,6	102,9	107,2
	Average	1,351073616	-2,861823888	-2,979108974	-1,327932027	-1,282449644	62,45	71,04	75,91	80,28	84,62

Sumber: diolah dari IMF dan Global Finance, 2015

*Operating Balance*. Data Gross Operating Balance ini hanya dapat diperoleh dari laporan *Government Finance Statistics* masing-masing negara yang pada kesempatan penelitian ini penulis dapatkan dari IMF. Sedangkan data *Debt to GDP Ratio* diperoleh dari masing-masing laporan keuangan dan analisis perekonomian suatu negara, yang pada kesempatan ini penulis mendapatkan data tersebut dari Global Finance.

Sesuai dengan landasan teori, kesinambungan fiskal diperoleh apabila rasio utang (*debt*) terhadap GDP adalah stabil. Penulis menggunakan dasar stabilnya rasio tersebut berupa rata-rata rasio utang terhadap GDP selama 2008-2012, yaitu *Debt to GDP Ratio* rata-rata

$$\begin{aligned} &= \frac{\sum_{k=0}^n \text{Debt to GDP Ratio}_k}{n} \\ &= \frac{62,45 + 71,04 + 75,91 + 80,28 + 84,62}{5} \\ &= 74,86 \end{aligned}$$

Rata-rata *Debt to GDP Ratio* ini akan ditandingkan dengan dengan *Debt to GDP Ratio* pada masing-masing tahun anggaran, dengan melakukan perhitungan: Penyimpangan terhadap rata-rata = |(Rata-rata pertahun) - 74,86| sehingga akan diperoleh selisih yang bernilai mutlak. Kemudian besarnya penyimpangan terhadap rata-rata tersebut dinilai ke dalam 5 kelompok data dengan interval yang sama. Data perhitungan disajikan pada tabel 4, sedangkan interval disajikan pada tabel 5.

Tabel 4. Data Perhitungan

Tahun	Debt to GDP Ratio (%)	Penyimpangan terhadap rata-rata	Nilai Kesinambungan Fiskal*
(a)	(b)	(c) =  (b) - 74,86	(d)
2008	62,45	12,41	1
2009	71,04	3,82	4
2010	75,91	1,05	5
2011	80,28	5,42	3
2012	84,62	9,76	2

Sumber: diolah dari IMF dan Global Finance

\*Berdasarkan interval penyimpangan pada tabel 5.

Tabel 5. Interval Penyimpangan

Interval Penyimpangan	Nilai Kesinambungan Fiskal
10,41-13,00	1
7,81-10,40	2
5,21-7,80	3
2,61-5,20	4
0-2,60	5

Sumber: data sekunder (diolah)

Setelah penulis melakukan perhitungan tabel 3, 4, dan 5, maka diperoleh 2 data variabel penelitian yang digunakan yaitu variabel bebas X = Penerapan GFS, dan

variabel terikat Y = Kebijakan Fiskal, yang disajikan pada tabel 6.

Tabel 6. Variabel Penelitian yang Digunakan

Tahun	Penerapan GFS	Kebijakan Fiskal
2008	1,351073616	1
2009	-2,861823888	4
2010	-2,979108974	5
2011	-1,327932027	3
2012	-1,282449644	2

Sumber: data sekunder (diolah)

#### 4.2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi linier, data variabel penelitian pada tabel 6 dilakukan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas dengan metode sampel Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan Lampiran 2: Hasil Uji Asumsi Klasik dengan bantuan SPSS 18, diperoleh data Sig. = 0,999. Dengan demikian, hasil pengujian menunjukkan bahwa Sig. > 0,05 sehingga disimpulkan bahwa data variabel yang diuji (tabel 6) berdistribusi normal dan dapat dilanjutkan dengan analisis regresi linear.

#### 4.3. Analisis Regresi

Data pada tabel 6 diolah dengan melakukan analisis regresi linier sederhana melalui program SPSS For Windows, dan diperoleh hasil sebagaimana pada Tabel 7.

Tabel 7 Hasil Analisis Regresi Linier

Model	Coefficients <sup>a</sup>			T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,810	,415		4,358	,022
Penerapan GFS	-,838	,197	-,926	-4,263	,024

a. Dependent Variable: Kebijakan\_Fiskal

Berdasarkan Tabel 7, diperoleh koefisien regresi yaitu nilai konstanta (a) = 1,810; b = -0,838; sehingga model persamaan regresi adalah sebagai berikut :

$$Y = 1,810 - 0,838X$$

Dari persamaan regresi yang dihasilkan, dapat dinyatakan bahwa :

- 1) Jika faktor Penerapan GFS sama dengan 0 maka kebijakan fiskal = 1,810.
- 2) Nilai koefisien b = -0,838 menunjukkan adanya pengaruh yang negatif antara variabel Penerapan GFS terhadap Kebijakan Fiskal. Artinya, apabila informasi *Gross Operating Balance* dalam Penerapan GFS tinggi, maka dapat dipandang sebagai penilaian terhadap hasil kebijakan fiskal yang kurang memuaskan dengan asumsi variabel lainnya konstan atau tetap.

#### 4.4. Uji Goodness of Fit ( $R^2$ )

Nilai koefisien determinasi atau  $R^2$  menggambarkan seberapa besar variasi dari variabel terikat dapat diterangkan oleh variabel bebas. Menurut Sugiyono (2010) pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut: 0,00-0,199 = sangat rendah; 0,20-0,399 = rendah; 0,40-0,599 = sedang; 0,60-0,799 = kuat; dan 0,80-1,000 = sangat kuat.

Tabel 9. Hasil Analisis Korelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,926	,858	-,811	,68720554

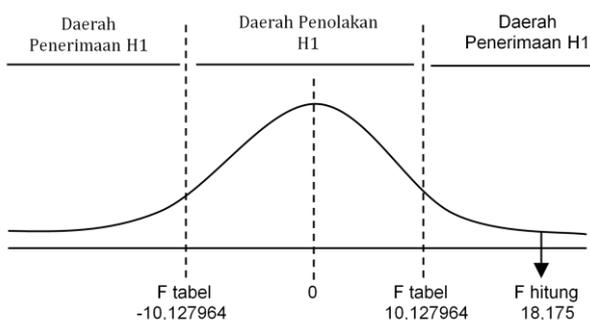
a. Predictors: (Constant), Penerapan\_GFS

Sumber : data sekunder (diolah)

Tabel 9 memperlihatkan bahwa nilai koefisien korelasi = 0,926 yang berarti sifatnya sangat kuat. Adjusted  $R^2$  Penerapan GFS adalah sebesar 0,811. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa sekitar 81,1% variasi variabel terikat dapat dijelaskan dan diprediksi oleh variabel-variabel bebas Penerapan GFS. Sisa variasi variabel terikat sebesar 18,9% dijelaskan oleh variabel bebas lain. Oleh karena itu, para peneliti seharusnya lebih peduli mengenai relevansi antara variabel bebas dan variabel terikat secara teoritis dan logis, serta signifikansinya secara statistik.

#### 4.5. Hasil Uji Hipotesis

Untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini maka dilakukan uji F untuk mengetahui apakah variabel bebas Penerapan GFS, berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu Kebijakan Fiskal. Dalam hasil analisis regresi linier sederhana melalui program SPSS For Windows juga diperoleh nilai F hitung (Anova). Nilai ini menunjukkan uji dan tingkat kelayakan model regresi (*goodness of fit*) sebagai derajat keberartian regresi linier. Nilai F dapat dilihat dalam Tabel 8. Berdasarkan Tabel 8, diketahui nilai  $F_{hitung}$  sebesar 18,175. Nilai ini lebih besar dari nilai  $F_{tabel}$  yaitu sebesar 10,127964, dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau alpha 0,05 dan *degree of freedom* ( $df$ ) =  $n-k = 5-2 = 3$  dan  $dk = k-1 = 2-1 = 1$ . Selain itu juga diperoleh nilai sig/significant sebesar 0,024. Sehingga dapat dikatakan bahwa regresi ini adalah linier dan signifikan.



Dapat disimpulkan sementara bahwa  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau nilai  $sig < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima berarti Penerapan GFS dapat secara relevan menilai Kebijakan Fiskal. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hipotesis diterima.

$H_0$  Ditoak,  $H_1$  diterima: *Penerapan Government Finance Statistics adalah relevan dalam menilai Kebijakan Fiskal.*

#### 4.6. Penjelasan atas Hasil Penelitian

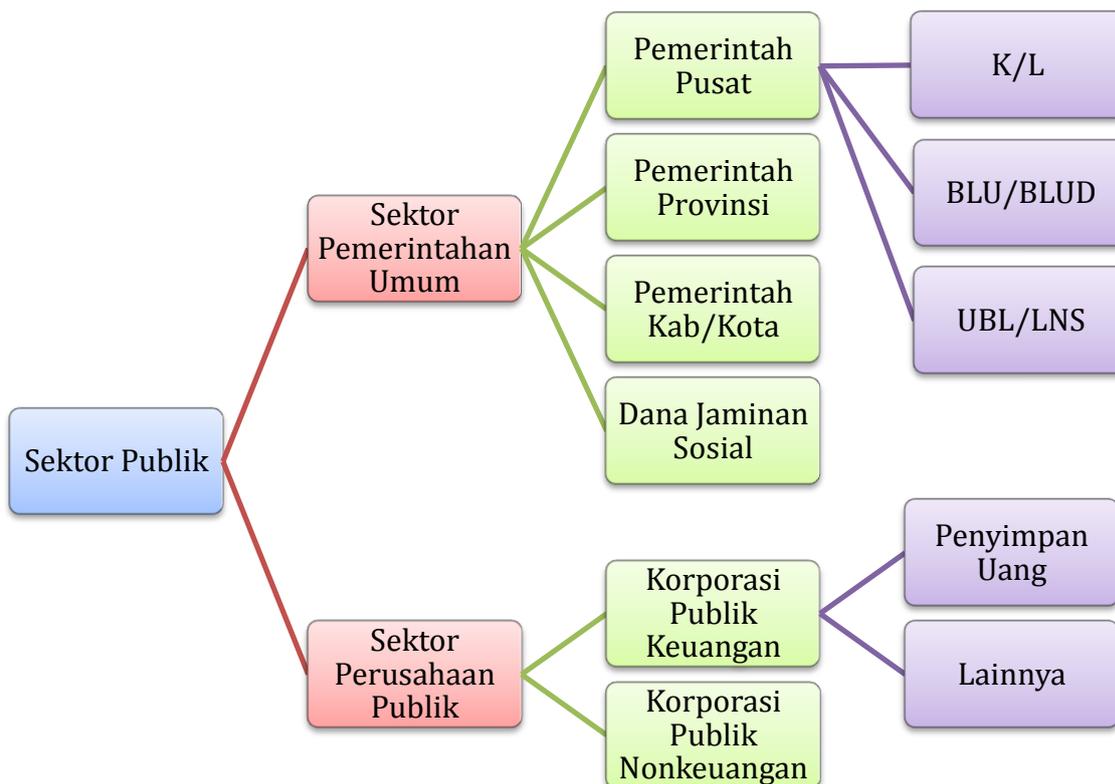
Penerapan Government Finance Statistics adalah relevan dalam menilai Kebijakan Fiskal. Dengan demikian, kebutuhan pemerintah akan adanya penerapan GFS dapat menjadi pilihan yang tepat karena telah terbukti bahwa dengan penerapan GFS pada beberapa negara dapat menjelaskan kebijakan fiskal yang terjadi pada tahun-tahun fiskal. Tingkat kontribusi yang tinggi, yaitu 81,1% menunjukkan adanya hubungan yang kuat antarvariabel.

Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, sesuai dengan amanat UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 8, salah satu tugas Menteri Keuangan adalah menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro. Sejah mana Menteri Keuangan berhasil dalam menyusun kebijakan fiskal, dapat dilihat dari dampak penerapannya. Penelitian ini menggambarkan keberhasilan kebijakan fiskal berupa Kesenambungan Fiskal, melalui Debt to GDP Ratio karena beberapa pertimbangan sesuai landasan teori. Sedangkan Penerapan GFS digambarkan oleh GOB (*Gross Operating Balance*) sebagai salah satu komponen utama dalam GFS.

Penerapan GFS sebagai sebuah pedoman baru perlu dikaji, dan ternyata diperoleh hasil penelitian pada beberapa negara yang telah menerapkan GFS bahwa Penerapan GFS dapat secara relevan menilai Kebijakan Fiskal karena secara konsisten hasil analisis regresi dan uji hipotesis menunjukkan adanya pengaruh signifikan dan menerima  $H_1$ . Hal ini penting, karena penulis berusaha mengembalikan lagi pada *nature* dari GFS itu sendiri yang dirancang untuk mendukung analisis fiskal. Data penelitian yang digunakan adalah penerapan GFS di beberapa negara lain, sementara penulis berusaha meneliti relevansinya terhadap kebijakan fiskal, untuk kemudian dari hasil tersebut dijadikan dasar berpikir bahwa pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 275/PMK.05/2014 tentang Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia (Mansikapi) sebagai adopsi dari GFS Manual merupakan pilihan yang tepat.

Persamaan regresi yang dihasilkan adalah  $Y = 1,810 - 0,838X$ . Besaran X bernilai negatif dapat dijelaskan dari komponen penerapan GFS yang diwakili dalam penelitian ini oleh *Gross Operating Balance*. Kemampuan negara dalam menghasilkan *Gross Operating Balance* yang merupakan hasil pengurangan beban terhadap pendapatan di dalam laporan opsional GFS, ternyata berbanding terbalik dengan kondisi fiskal yang diharapkan. Semakin besar *Gross Operating Balance*, semakin buruk keadaan

Bagan 1. Sektor Publik Menurut Mansikapi



Sumber: diolah dari Mansikapi

fiskalnya yang dibuktikan dengan kesinambungan fiskal yang kurang stabil.

Hal ini dapat dijelaskan dengan analogi bahwa pemerintah seharusnya tidak terlalu *profit oriented* dalam menyelenggarakan kegiatan layanan kepada masyarakat, bahkan pemerintah dituntut untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat di negara tersebut dengan terus menambah pengeluaran sektor publik dalam kondisi fiskal yang mengalami resesi, serta melakukan penyeimbangan-penyeimbangan yang dianggap perlu dalam keadaan ekonomi inflasi.

Pengeluaran sektor publik yang berhubungan erat dengan beban operasional akan masuk di dalam laporan operasional sebagai beban, mengurangi pendapatan. Semakin besar beban tersebut, maka semakin kecil kemungkinan *Gross Operating Balance* yang dihasilkan pada laporan operasional tersebut. Kenyataan yang menunjukkan bahwa semakin kecil *Gross Operating Balance* akan menimbulkan hasil kebijakan fiskal yang lebih baik, merupakan salah satu dasar bagi negara-negara menganut paham defisit, yakni selalu berencana menambah pengeluaran hingga melebihi pendapatan. Kekurangan dana ditutupi dengan pembiayaan utang.

Berikut adalah beberapa penjelasan yang penulis kemukakan terkait relevansi penerapan GFS berupa *Gross Operating Balance* di dalam Laporan Operasional GFS, dalam menilai Kebijakan Fiskal.

#### a. Pendapatan

Persamaan regresi hasil penelitian ini, yaitu  $Y = 1,810 - 0,838X$  menunjukkan bahwa komponen  $X =$  Penerapan GFS yang dalam hal ini dijelaskan oleh *Gross Operating Balance*, memiliki kontribusi yang bersifat negatif atau berkebalikan terhadap Kebijakan Fiskal yang digambarkan oleh kesinambungan fiskal. Pendapatan, yang terdiri atas beberapa jenis, sebagaimana disampaikan dalam landasan teori, sekilas akan menambah arus dan posisi dalam laporan neraca, tetapi konsekuensi dari penambahan arus dan posisi ini adalah pemerintah harus segera menggunakannya dalam pos beban yang tepat untuk kemanfaatan masyarakat.

Di dalam bahasan *Government Finance Statistics*, ruang lingkup sektor publik terkesan lebih luas dari yang dikenal oleh masyarakat, yaitu tersaji dalam Bagan 1.

Kebijakan mengenai pendapatan merupakan bagian dari kebijakan fiskal pemerintah, tidak hanya dari sektor pemerintahan umum, tetapi juga dari sektor perusahaan publik. Kenaikan/penurunan pendapatan beserta efeknya terhadap kesinambungan fiskal dapat disebabkan karena pos-pos pendapatan itu sendiri yang meliputi:

##### 1) Pendapatan Pajak

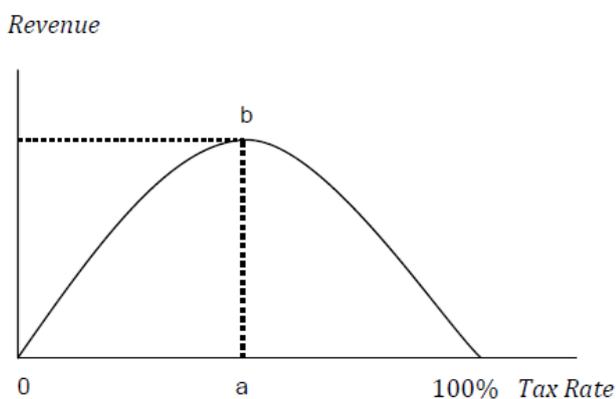
Pajak, sebagai transfer wajib tanpa imbalan langsung yang diterima oleh sektor pemerintahan umum, dipungut dari wajib pajak berdasarkan kebijakan tarif,

pengurangan terhadap penghasilan bruto, dan beberapa kebijakan teknis lainnya. Tentunya, selain berpengaruh terhadap pendapatan negara, hal ini juga berakibat pada kondisi wajib pajak yang dikenakan pajak, kondisi usaha wajib pajak, para pekerja yang bekerja di bawah usahanya, para pemasok wajib pajak, pembeli, pihak pembiayaan, semuanya akan merasakan dampak dari salah satu bagian kecil dari kebijakan fiskal ini yaitu kebijakan tarif pajak.

Pemberlakuan basis akrual dalam pencatatan pendapatan dan beban juga dirasakan menimbulkan keadilan dalam penandingan pendapatan dan beban, sehingga pendapatan pajak yang merupakan bagian dari pendapatan pajak tahun ini akan menjadi hak pendapatan pajak tahun ini, meskipun belum terealisasi pembayarannya dalam PPh Pasal 29 (di Indonesia), tetapi dapat direkonsiliasikan dalam sebuah sistem yang terpadu. Lantas apa pengaruhnya terhadap kesinambungan fiskal? Dengan adanya basis akrual misalnya, maka juga akan mengukur tingkat keseimbangan fiskal secara adil dan tidak hanya didasarkan akan penerimaan kas semata pada periode tersebut.

Kembali lagi ke dalam masalah pendapatan pajak, pembebanan tarif yang berlebihan akan menyebabkan kondisi wajib pajak yang makin tidak profitabel, karena terlalu banyak sumber daya yang ada digunakan untuk membayar pajak. Dengan demikian, maka kemampuan wajib pajak dalam meningkatkan perekonomian, kemampuan wajib pajak dalam mencukupi kebutuhan hidupnya menjadi berkurang. Secara psikologis juga dapat berakibat pada kemalasan melakukan kegiatan usaha, sehingga berakibat pada pengangguran tenaga kerja. Pemasok yang berhubungan dengan wajib pajak tersebut, juga akan kehilangan pelanggan. Dalam posisi tarif tertentu, Kurva Laffer menggambarkan hubungan antara tarif pajak dengan penerimaan pajak (Alink dan Kommer, 2011: 61). Penjelasan kurva ini dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2. Laffer Curve



Sumber: Alink dan Kommer, 2011

Melihat hal itu, maka pengenaan pajak sebagai pungutan harus tetap memperhatikan azas, dan fungsi dari pungutan pajak itu sendiri, tidak sekedar melihat satu sisi saja. Misalnya, dalam pemungutan pajak

memiliki azas *convenience of payment*, dan memiliki fungsi budgetair serta *regulerend*. Di antara hal itu harus dijaga keseimbangannya, agar menghasilkan kombinasi yang terbaik dalam perekonomian nasional. Sebagai contoh, pemungutan pajak dengan tarif yang sangat tinggi atas penghasilan orang pribadi, dan batas waktu penyetoran adalah pada hari yang sama dengan tanggal gaji, maka hal ini mungkin secara fungsi budgetair bagus karena mempercepat pendapatan negara yang masuk ke kas negara, tetapi tidak sesuai dengan azas *convenience of payment* karena menyulitkan Wajib Pajak.

Pajak seringkali diasosiasikan dengan kebijakan fiskal, tetapi sebenarnya secara terpisah masing-masing memiliki peranan yang berbeda, menurut Barron, et. al. (1988: 552). Mengatur pajak sebagai instrumen fiskal yang mengatur ekonomi merupakan hal baru yang tidak dilakukan pada zaman dahulu, sehingga peranan pajak saat telah diperluas fungsinya, berawal dari sekadar pendapatan negara, diperluas menjadi instrumen fiskal.

## 2) Kontribusi Sosial

Sebagai pendapatan aktual atau pendapatan yang diperhitungkan skema asuransi sosial dalam rangka penyediaan manfaat asuransi sosial yang terutang, kontribusi sosial yang makin besar berpotensi menyebabkan terganggunya kesinambungan fiskal. Kebijakan pendapatan dari kontribusi sosial dapat meliputi kebijakan tarif, kebijakan perjanjian pertanggungan, serta berbagai kebijakan lain yang terkait. Di Indonesia, kontribusi sosial ini mirip dengan iuran yang ditarik oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Dalam penyusunan GFS, sektor ini termasuk dalam cakupan, sedangkan dalam LKPP, belum dicakup.

Dalam siklus normal, iuran BPJS diperhitungkan dalam penyusunan lapran dalam rangka penyusunan GFS, sehingga dapat secara keseluruhan dilihat mengenai pendapatan dari kontribusi sosial serta berbagai kemungkinan fiskal yang akan terjadi. Implikasi dari pemungutan iuran adalah makin banyak orang yang menanggungkan dirinya dalam jaminan sosial, artinya selain dilihat dari segi pendapatan kontribusi sosial yang meningkat, juga dapat diamati bahwa masyarakat akan semakin merasa dirinya terjamin, dan potensi diri untuk menjalankan kegiatan ekonomi menjadi lebih kecil. Sekali lagi, hal ini hanyalah kecenderungan, karena ada juga kecenderungan sebaliknya, yaitu para karyawan akan merasa lebih merasa aman atau terjamin sehingga lebih produktif karena bisa konsentrasi terhadap pekerjaan rutinnnya.

Dengan demikian, pengaruh peningkatan pendapatan kontribusi sosial terhadap kesinambungan fiskal tergantung dari kepentingan dan cara pandang masyarakat di sebuah negara dalam menyikapi iuran jaminan sosial. Penerapan sektor dana jaminan sosial ini akan optimal apabila dikeola secara baik, dan memberikan kebijakan-kebijakan yang berimbang. Pengaruh ini hanya dapat dianalisis jika Penerapan GFS

telah dilakukan karena LKPP tidak memberikan ruang bagi sektor dana jaminan sosial untuk masuk dalam laporan keuangan konsolidasi LKPP.

### 3) Hibah

Hibah, transfer tidak wajib yang diterima dari pemerintah lain/organisasi internasional dalam bentuk kas dan non-kas (barang/jasa), bukanlah suatu target pendapatan tetapi akan memberikan efek yang kurang baik terhadap kesinambungan fiskal ketika hibah yang diberikan membawa misi tidak tertulis, di mana suatu saat di masa depan negara penerima memiliki kewajiban yang tak tertulis untuk melakukan suatu kebijakan tertentu yang sudah barang tentu akan mempengaruhi pengeluaran pemerintah. Secara tidak langsung, pengeluaran tersebut akan mengurangi jatah pengeluaran pemerintah yang akan digunakan untuk kepentingan fungsi utama pemerintahan.

Akibatnya, kebijakan pemerintah dalam penerapannya akan merugikan rakyat, dan menurunkan kestabilan ekonomi. Pendapatan Domestik Bruto rendah baik secara nasional maupun perkapita. Oleh karena itu, dalam melakukan perjanjian hibah hendaknya didasari atas perjanjian yang saling percaya dan benar-benar ikhlas antarpihak.

### 4) Pendapatan lain

Pendapatan lain mencakup semua transaksi pendapatan yang tidak diklasifikasikan sebagai pajak, kontribusi sosial atau hibah, yang dapat meliputi penjualan barang dan jasa, bunga dan jenis lain dari pendapatan atas kekayaan, transfer sukarela dalam bentuk kas dan non-kas selain hibah, serta denda dan penalti. Mereka memiliki karakter yang hampir sama dengan jenis sebelumnya. Pada intinya, penerimaan pendapatan lain dapat mengakibatkan timbulnya potensi tidak diterimanya pendapatan lain yang lebih besar, atau berpotensi menambah porsi pengeluaran pemerintah untuk kepentingan terkait. Dalam pendapatan lain ini pun menggunakan basis akrual dalam pengakuan transaksinya.

Penerapan basis akrual, misalnya jika terjadi pendapatan sewa selama 5 tahun, kas di terima di muka pada tahun pertama, maka performa pendapatan seharusnya tidak hanya dinilai dari basis kas dengan memasukkannya dalam laporan operasional tahun pertama, tetapi harus bisa menggunakan basis akrual dengan mendistribusikan pendapatan sewa tersebut selama masa sewa berlangsung yang akan menunjukkan performa pendapatan yang sesuai dengan keterjadian transaksinya. Melalui GFS, penandingan antara pendapatan dan beban yang bersesuaian ini juga dapat terkonsolidasi secara intrasektoral maupun intersektoral, sesuai dengan tujuan analisis fiskal dengan statistik pelaporan keuangannya.

Nominal dari *Gross Operating Balance* mencerminkan sektor publik mana yang akan dianalisis, dan hal ini tidak akan bisa dilakukan dalam laporan keuangan pemerintah dengan tujuan umum,

yang sekarang dapat dijumpai dalam laporan keuangan pemerintah pusat yang dasar penyusunannya menggunakan PSAP (berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010). Meskipun dalam penerapannya telah terdapat laporan operasional, tetapi konten dari laporan tersebut nantinya akan berbeda dengan laporan operasional GFS karena cakupan sektor dari LKPP adalah pemerintah pusat saja. Kini, dengan pemerintah daerah pun belum dilakukan konsolidasi.

### b. Beban

Beban, yang terdiri atas beberapa jenis, sebagaimana disampaikan dalam landasan teori, sekilas akan mengurangi arus dan posisi dalam laporan GFS, tetapi konsekuensi dari pengurangan arus dan posisi ini adalah peningkatan perekonomian dengan kondisi fiskal yang berkesinambungan. Implikasi dari kebijakan fiskal terkait beban yaitu mengatur pengeluaran pemerintah. Beberapa jenis beban yang relevan dalam menilai kebijakan fiskal adalah:

#### 1) Kompensasi pegawai

Remunerasi dalam bentuk kas atau nonkas yang terutang kepada pegawai sebagai imbalan pekerjaan. Secara umum pemberian kompensasi adalah untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan keberhasilan strategi dan menjamin terciptanya keadilan baik keadilan internal maupun keadilan eksternal. Schuler dan Jackson (1999) menyatakan bahwa melalui kompensasi dapat digunakan untuk (a) menarik orang-orang yang potensial atau berkualitas untuk bergabung dengan organisasi. (b) mempertahankan pegawai yang baik. (c) meraih keunggulan kompetitif. (d) memotivasi pegawai dalam meningkatkan produktivitas atau mencapai tingkat kinerja yang tinggi. (e) melakukan pembayaran sesuai aturan hukum. (f) memudahkan sasaran strategis. (g) mengokohkan dan menentukan struktur.

Apabila pemberian kompensasi tersebut mampu mengundang orang-orang yang potensial untuk bergabung dengan organisasi dan membuat pegawai yang baik untuk tetap bertahan di organisasi, serta mampu memotivasi pegawai untuk meningkatkan kinerjanya, berarti produktivitas juga akan meningkat dan organisasi dapat menghasilkan layanan yang unggul atau produk dengan harga yang kompetitif, sehingga organisasi lebih dimungkinkan untuk dapat mencapai sasaran strategisnya yaitu mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan usaha.

Hasil penelitian rupanya sejalan dengan prinsip kompensasi ini. Semakin besar kompensasi kepada pegawai, tidak selalu berarti bahwa hal itu merupakan pemborosan dan inefisiensi, tetapi justru dengan perencanaan dan sistem kompensasi yang baik dan terukur, dapat melipatgandakan kinerja organisasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat, yang secara tidak langsung berakibat pada stabilitas ekonomi masyarakat. Begitu pula dalam sektor perusahaan publik (BUMN/BUMD), kinerja karyawan dalam menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh hajat hidup orang banyak, dapat terpenuhi

sebagaimana mestinya, bahkan akan mengalami peningkatan-peningkatan yang berarti.

Dalam *Government Finance Statistics*, kompensasi, sebagai salah satu jenis beban, merupakan hasil konsolidasi kompensasi pegawai negeri sipil pusat, pegawai negeri sipil daerah, pegawai kontrak, pegawai BUMN, hingga pegawai dana jaminan sosial. Hal ini terkait dengan cakupan *Government Finance Statistics* pada bagan 1 yang cakupannya dapat menjangkau seluruh sektor publik mulai dari pemerintahan umum hingga korporasi publik, tergantung dari metode konsolidasi yang digunakannya. Luasnya cakupan kompensasi pegawai dalam GFS ini, dapat menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah dalam menganalisis masalah dalam rangka pengambilan kebijakan fiskal karena beban kompensasi pegawai sebagai bagian dari pengurang pendapatan, dapat menilai kinerja fiskal pemerintah pada tahun fiskal yang bersangkutan.

Mengingat pentingnya kompensasi dalam membentuk stabilitas fiskal, hendaknya pemerintah maupun unit institusional sektor publik lainnya memperhatikan beberapa hal: (1) kompensasi yang diberikan harus dapat dirasakan adil oleh pegawai dan (2) besarnya kompensasi tidak jauh berbeda dengan yang diharapkan oleh pegawai. Kepuasan pegawai akan timbul, dan akan memicu pegawai untuk terus meningkatkan kinerjanya, sehingga tujuan organisasi maupun kebutuhan pegawai akan tercapai secara bersama.

Keadilan dapat diperoleh dengan mempertimbangkan kondisi eksternal kondisi internal dan kondisi individu. Kompensasi harus diusahakan sebanding dengan kondisi di luar organisasi. Kompensasi juga harus memperhatikan kondisi individu, sehingga tidak memberikan kompensasi dengan pertimbangan subyektif dan diskriminatif. Untuk memenuhi harapan pegawai, hendaknya kompensasi yang diberikan oleh organisasi dapat memuaskan berbagai kebutuhan pegawai. Kompensasi yang diberikan berdasarkan pekerjaan atau senioritas tanpa memperhatikan kemampuan dan keterampilan seringkali membuat pegawai yang mempunyai keterampilan dan kinerja baik menjadi frustrasi dan meninggalkan organisasi, sebab kompensasi yang diberikan oleh organisasi dirasakan tidak adil dan tidak sesuai dengan harapan mereka. Sebaliknya kompensasi ini akan membuat pegawai yang tidak berprestasi menjadi benalu bagi organisasi. Kompensasi yang diberikan berdasarkan kinerja dan keterampilan pegawai nampaknya dapat memuaskan pegawai, sehingga diharapkan pegawai termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan keterampilannya. Hal ini disebabkan karena pegawai yang selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja dan keterampilannya akan mendapatkan kompensasi yang semakin besar.

## 2) Penggunaan barang dan jasa

Beban kedua adalah barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi atau diperoleh untuk dijual kembali dikurangi dengan perubahan neto

persediaan barang dan jasa tersebut. Dalam akuntansi komersial, dikenal adanya beban pokok penjualan atau COGS (*Cost of Goods Sold*). Terkesan aneh, mengapa di dalam pemerintahan terdapat COGS? Apakah fungsi pemerintah adalah bisnis/penjualan untuk memperoleh keuntungan? Di dalam GFS terdapat sektor korporasi publik nonkeuangan, di mana kegiatan utamanya adalah kegiatan bisnis, tetapi pemerintah memiliki andil yang tinggi dalam menentukan arah kebijakan perusahaan untuk memastikan bahwa kegiatan bisnisnya itu benar-benar sesuai dengan tujuan pemerintah dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat.

Di dalam GFS, BUMN merupakan sebuah unit institusi, yaitu entitas ekonomi yang mampu, dalam dirinya sendiri, untuk memiliki aset, menimbulkan kewajiban, dan terlibat dalam kegiatan ekonomi dan transaksi dengan entitas lain. Dalam menjalankan bisnisnya, BUMN ini melakukan penjualan barang/jasa melalui mekanisme pasar. Penjualan yang tinggi akan menyebabkan penggunaan beban pokok penjualan yang lebih besar pula. Akan tetapi, tidak selamanya berbanding lurus antara besarnya biaya produksi terhadap kesinambungan fiskal. Dengan demikian, sejalan dengan peningkatan penjualan itu, efisiensi baban produksi menjadi lebih penting. Selain itu, dapat dipandang bahwa perekonomian masyarakat akan meningkat dengan adanya penggunaan bahan baku dan tenaga kerja dari kalangan masyarakat. Pengadaan barang/jasa, penggunaan tenaga kerja, berakibat baik terhadap perkembangan ekonomi masyarakat sehingga menjadi lebih stabil.

## 3) Penggunaan/konsumsi aset tetap (Penyusutan)

Penurunan nilai aset tetap selama periode akuntansi sebagai akibat penurunan fisik, kadaluarsa normal, dan kerusakan normal yang tidak disengaja. Secara tidak langsung penyusutan berpengaruh terhadap stabilitas fiskal dalam kerangka bahwa makin banyak pengadaan barang modal. Pengadaan barang modal dilakukan melalui proses pengadaan barang/jasa. Proses ini memiliki dampak yang baik terhadap perekonomian di sektor riil maupun finansial. Di sektor riil, masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam penyediaan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya produksi overhead. Masyarakat yang sebelumnya menganggur dapat memperoleh pekerjaan. Para pemasok bahan baku mendapatkan pelanggan.

## 4) Bunga adalah beban yang timbul atas penggunaan dana unit lain oleh debitur

Besaran bunga yang makin bertambah, dimungkinkan adanya penambahan jumlah hutang dalam rangka menjaga *Debt to Gross Domestic Bruto Ratio* (rasio hutang terhadap PDB). PDB yang selalu meningkat setiap tahunnya harus diikuti oleh peningkatan pembiayaan yang diperlukan untuk menopang defisit anggaran tersebut, yang salah satu porsi terbesar berasal dari hutang. Hutang yang makin besar menimbulkan konsekuensi berupa pembayaran

bunga setiap tanggal jatuh tempo bunga, di samping pembayaran pokok hutangnya. Pokok hutang yang tetap pun masih bisa menambah beban bunga karena pengaruh kurs yang makin melemah, atau karena perjanjian tertentu bahwa *yield-to-maturity* harus disesuaikan dengan harga pasar terkini yang makin meningkat. Dari 26 negara yang telah menerapkan GFS sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1, secara rata-rata mengalami kenaikan *Debt to GDP Ratio* mulai dari 62,45% pada tahun 2008; 71,04% pada tahun 2009; 75,91% pada tahun 2010; 80,28% pada tahun 2011; dan 84,62% pada tahun 2012.

Hal ini menggambarkan bahwa memang praktik utang di beberapa negara memang dilakukan, di mana jumlahnya meningkat bukan hanya dari segi persentase tetapi juga nominalnya, sebagai dampak dari penerapan kebijakan defisit anggaran. Negara-negara tersebut juga pastinya memiliki konsekuensi yang sama untuk membayar bunga pada kreditur. Beban bunga makin meningkat seiring dengan penambahan pokok utangnya, tetapi dampaknya akan terasa dalam perekonomian. Menurut Rahardja dan Manurung (2004), defisit anggaran memang direncanakan untuk defisit, sebab pengeluaran pemerintah direncanakan lebih besar dari penerimaan pemerintah ( $G > T$ ). Anggaran yang defisit ini biasanya ditempuh bila pemerintah ingin menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Hal ini umumnya dilakukan bila perekonomian berada dalam kondisi resesi.

Dalam kondisi yang tidak reses pun, seperti negara-negara maju, juga tetap menerapkan kebijakan defisit sehingga rasio utang terhadap PDB menjadi indikator yang disepakati dalam mengukur stabilitas kesinambungan fiskal. Dengan demikian, beban bunga yang makin tinggi, sepanjang masih dalam kerangka yang dapat ditoleransi, dapat memberikan indikator yang baik bahwa fiskal tetap dianggap stabil.

Dalam basis akrual, pembebanan bunga utang didasarkan atas kejadian ekonominya, bukan pembayaran semata. Jadi, meskipun pada akhir periode bunga belum dibayar, akan dianggap sebagai penyesuaian beban bunga pada hutang bunga. Dengan demikian, pembebanan ekonomi atas beban bunga ini menjadi relevan dan akuntabel dalam memberikan gambaran besaran beban bunga yang sebenarnya dapat diakui dalam tahun berjalan. Pemerintah pun dapat melakukan analisis fiskal dengan dasar ini: peningkatan beban bunga dapat menilai bahwa fiskal stabil.

#### 5) Subsidi

Transfer tahun berjalan yang dibayar oleh unit pemerintah kepada perusahaan dalam rangka memberikan kompensasi atas kerugian operasi, baik berdasarkan tingkat aktivitas produksi atau berdasarkan kuantitas atau nilai barang/jasa yang diproduksi, dijual atau diimpor. Tidak ada negara yang tidak menggunakan subsidi. Bahkan negara yang bergabung dalam *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* seperti Inggris dan Amerika Serikat juga menjadikan instrumen subsidi

dalam pembangunan ekonomi. Subsidi kepada petani merupakan instrumen yang sangat penting diambil oleh negara OECD. Dia tidak saja dimaksudkan untuk memenuhi produksi dalam negeri, namun adalah untuk memperluas pangsa pasar internasional. Selain itu, program jaminan sosial yang dilakukan di negara-negara OECD juga menunjukkan bagaimana negara maju sangat konsen terhadap kebijakan subsidi dalam rangka memberikan pelayanan terhadap warga negaranya.

Tujuan pemerintah melakukan subsidi adalah agar masyarakat dapat memenuhi hajat hidupnya dengan harga beli yang lebih terjangkau atas barang dan jasa publik yang disubsidi tersebut. Dengan alokasi yang tepat guna, bertambahnya beban subsidi dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli atas kebutuhan tersebut, dapat meningkatkan pengeluaran agregat masyarakat. Akibatnya, setidaknya masyarakat, baik secara terpilih maupun tidak terpilih, dapat menikmati barang/jasa yang disubsidi tersebut. Subsidi terhadap barang produksi akan meningkatkan kemampuan dalam menghasilkan barang/jasa yang juga berdampak pada penyediaan barang/jasa di masyarakat dengan harga yang terjangkau. Keterlibatan masyarakat dalam penyediaan faktor produksi, juga berdampak serius dalam perekonomian.

Dungtji Munawar (2013) menyatakan dalam makalahnya bahwa pelaksanaan subsidi perlu mengubah polanya sesuai dengan kondisi. Misalkan, pengalihan subsidi secara bertahap dari subsidi harga yang kurang efektif dan tidak tepat sasaran kepada subsidi bahan-bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat kurang mampu (*targeted subsidy*). Pemerintah diharapkan tetap mempertahankan kebijakan subsidi baik subsidi energi maupun subsidi nonenergi karena subsidi ini masih diperlukan terutama oleh golongan yang memiliki daya beli rendah. Kebijakan subsidi non-energi supaya lebih fokus kepada program subsidi untuk mengurangi beban masyarakat miskin, dan membantu usaha kelompok kecil dan menengah. Misalkan lebih fokus kepada subsidi pupuk atau subsidi benih, dan apabila pemerintah akan menerapkan kebijakan pengurangan subsidi secara bertahap, maka harus dipilih terlebih dahulu skenario yang berdampak paling kecil dan berdasarkan database kependudukan yang akurat.

#### 6) Hibah

Transfer tidak wajib dalam bentuk kas atau non-kas yang dibayarkan ke unit pemerintah umum lainnya atau organisasi internasional. Beban Hibah yang diberikan pemerintah kepada organisasi internasional, akan dapat saja berlaku aturan main sebagaimana pendapatan hibah yang diterima pemerintah: adanya kepentingan. Di dalam GFS, transaksi antarsektor berupa akun resiprokal yang tercakup dalam GFS dieliminasi, termasuk pemberian hibah dari pusat ke daerah, hibah dari pusat ke BUMN, ataupun dari BUMN ke BUMN. Eliminasi atas akun resiprokal ini dimaksudkan karena transaksi seolah-olah terjadi

dalam satu unit kesatuan yang tergabung dalam sebuah konsolidasi laporan GFS.

Dengan penyatuan data laporan ini, pemberian hibah menjadi dapat lebih jelas efeknya untuk hibah yang diberikan ke luar sektor publik, bisa kepada masyarakat/rumah tangga umum, sektor privat, atau internasional. Kebijakan fiskal dapat diambil dengan mengambil langkah yang tepat berdasarkan informasi yang akurat dari laporan GFS, khususnya dalam masalah hibah ini.

#### 7) Manfaat sosial

Transfer tahun berjalan kepada rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan yang timbul atas suatu kejadian seperti sakit, menganggur, pensiun, kebutuhan perumahan atau keadaan keluarga yang dapat dibayarkan dalam kas atau non-kas. Manfaat sosial ini merupakan konsekuensi dari pemerintah sebagai pelindung warganya. Pada sisi pendapatan, pemerintah juga memperoleh pendapatan dari kontribusi sosial, di mana pendapatan ini dihimpun dari iuran jaminan sosial dari masyarakat yang menjamin kondisi kesehatan, kecelakaan kerja, atau kematiannya. Kemudian pada sisi beban, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan manfaat atas jaminan tersebut ketika peristiwa menyebabkan klaim terjadi.

Semakin besar manfaat sosial yang diberikan, ternyata berkorelasi positif terhadap kestabilan ekonomi karena masyarakat merasa terlindungi dan percaya kepada sektor publik. Uang pertanggung jawaban dapat digunakan masyarakat untuk menanggung beban terkait, atau juga dapat digunakan untuk kebutuhan lain apabila masih bisa disisihkan. Kondisi kesehatan pun dapat terjaga, dan masyarakat dapat melanjutkan aktivitas ekonominya.

#### 8) Beban lainnya

Meliputi semua beban yang tidak dapat dimasukkan dalam klasifikasi lain. Penerapan GFS yang terintegrasi beserta penggunaan basis akrual menjadi tolok ukur dalam setiap pembebanan termasuk beban lainnya ini. Dengan tolok ukur yang akurat, maka informasi yang diberikan akan lebih akurat sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam kebijakan fiskal pemerintah.

### 4.7. Hambatan dan Tantangan Penerapan GFS

Pentingnya penerapan GFS, menuntut pemerintah segera merealisasikan GFS di Indonesia. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 275/PMK.05/2014 tentang Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia (Mansikapi), pemerintah telah memiliki pedoman GFS. Mansikapi adalah bentuk GFS yang barusaja ditetapkan di Indonesia sebagai sebuah landasan dalam melakukan statistik keuangan pemerintah. Dalam tahap selanjutnya, perlu adanya sebuah petunjuk teknis yang jelas yang didasari oleh payung hukum.

Meskipun mengadopsi dari GFSM 2014, Mansikapi tidak serta merta mengambil mentah-

mentah materi yang ada dalam GFSM 2014 tersebut, karena memang GFSM 2014 juga memberikan kelonggaran kepada pengguna untuk menyesuaikan penerapannya di negara masing-masing. Sebagaimana dijelaskan di GFSM, pembagian sektor dan subsektor dalam perekonomian, serta pendefinisian sektor pemerintah umum dan sektor publik untuk menentukan cakupan kompilasi data statistik dalam Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia mempertimbangkan ketersediaan data statistik dan manfaatnya, serta cakupan unit dalam Statistik Keuangan Pemerintah. Jadi, meskipun terdapat sedikit perbedaan, tetapi masih dalam garis yang sama.

Salah satu bentuk perbedaan yang diterapkan pemerintah RI adalah dimasukkannya BLU/BLUD dan UBL/LNS dalam unsur sektor pemerintahan umum di subsektor pemerintah pusat. Adapun alasan memasukkan BLU/BLUD adalah karena BLU/BLUD merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan pengklasifikasian BLU/BLUD sebagai kuasi-korporasi atau bagian dari sektor korporasi publik, jika terdapat BLU/BLUD yang memenuhi definisi unit institusi dan menjual barang/jasa dengan harga yang signifikan secara ekonomi.

Dalam hal output laporan yang dihasilkan, Mansikapi tidak mewajibkan adanya Laporan perubahan kekayaan neto (*The Statement of Total Changes in Net Worth*) dan Laporan Ringkas Kewajiban Kontinjensi eksplisit dan Kewajiban implisit bersih untuk Manfaat Jaminan Sosial (*The Summary Statement of Explicit Contingent Liabilities and Net Implicit Obligations for Future Social Security Benefits*). Mansikapi hanya menjelaskan di bagian Neraca, bahwa perubahan kekayaan neto merupakan ukuran untuk menilai kesinambungan aktivitas fiskal. Kekayaan Keuangan Neto (*net financial worth*) sama dengan aset keuangan dikurangi dengan kewajiban. Indikator ini diperlukan karena kesulitan untuk menetapkan harga pasar aset non-keuangan, sehingga beberapa analisis difokuskan pada aset keuangan, dan tidak menggunakan total asetnya. Dengan demikian laporan harus diinterpretasi sendiri oleh pengguna dari neraca.

Tantangan berikutnya, adalah sebagaimana disajikan dalam tabel 1 Perbedaan Konseptual, terdapat perbedaan prinsip antara GFS dengan standar akuntansi pemerintah (pada sektor pemerintahan umum), serta antara GFS dengan standar akuntansi keuangan (pada sektor perusahaan publik), mulai dari tujuan, *scope*, entitas pelaporan, kriteria pengakuan, pengukuran, revaluasi dan perubahan nilai, serta integrasi arus dan posisi. Perbedaan mendasar inilah yang membuat pemerintah RI harus membentuk sumber daya baru atau memodifikasi sumber daya yang sudah ada agar penerapan GFS dapat terlaksana dengan baik, mengingat kegunaan GFS yang

bermanfaat dalam menilai kebijakan fiskal. SDM adalah salah satu bagian utama sumber daya yang harus dipersiapkan. Dengan demikian, kegiatan pendidikan dan pelatihan yang memadai perlu dirancang.

Di samping kesiapan SDM, hal terkait peraturan, sarana, dan prasarana juga merupakan hal yang penting. Kesiapan dari segi peraturan perundangan sudah mulai dilakukan, yakni Undang-Undang telah dipersiapkan sejak tahun 2004, tetapi kewajiban pembuatan Statistik Keuangan Pemerintah baru diakomodir setelah beberapa tahun kemudian. Tahun 2012, penegasan tugas dan fungsi kanwil Ditjen PBN tentang kewajiban membuat GFS Wilayah. Tahun 2013, penegasan dengan juklak. Kemudian, akhir tahun 2014, pembuatan Mansikapi (Manual Statistik Keuangan Pemerintah). Dengan demikian, dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 Kanwil Ditjen PBN sudah ditugaskan untuk membuat GFS, tetapi pedoman baru terbit akhir tahun 2014.

Demikian pula dengan SAP yang ada di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, meskipun telah mengakomodasi basis akrual, hal itu masih belum bisa secara keseluruhan dapat mengakomodasi Mansikapi. Komite Satandar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia belum menyajikan PSAP secara spesifik mengenai GFS, tetapi dilihat dari bahasan yang dilakukan, bahasan lebih berfokus pada laporan keuangan konsolidasi dan Akuntansi Investasi. Laporan Keuangan Konsolidasian diatur di dalam PSAP 11, sedangkan Akuntansi Investasi diatur di dalam PSAP 06. PSAP 11 menjelaskan bahwa standar ini hanya menjelaskan penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum, yaitu untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagai besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangan.

Hal ini dikuatkan dengan paragraf 5 PSAP 11, bahwa pernyataan standar laporan keuangan konsolidasi tidak mengatur: (a) Laporan keuangan konsolidasian perusahaan negara/daerah; (b) Akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi; (c) Akuntansi untuk investasi dalam usaha patungan (*joint venture*); dan (d) Laporan statistik gabungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, yang dikonsolidasikan di dalam laporan keuangan pemerintah pusat di Indonesia mencakup semua entitas pelaporan keuangan semua entitas akuntansi termasuk laporan keuangan BLU.

Dalam kerangka GFS, perlu juga dikembangkan beberapa sistem dalam menyusun laporan ekonomi dan statistik seperti Sistem Neraca Nasional (*System of National Accounts - SNA*), Manual Neraca Pembayaran (*The Balance of Payments Manual*), Manual Statistik Moneter dan Keuangan (*The Monetary and Financial Statistics Manual*). Tentu hal ini merupakan usaha dan prestasi, yang dapat diambil hikmahnya, bahwa banyak untuk membuat suatu tujuan tercapai, minimal harus memiliki payung hukum terlebih dahulu, dan kemudian diikuti oleh sarana dan prasarananya.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan estimasi model data panel menggunakan pendekatan PLS menunjukkan bahwa variabel LFDI mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel LGDP untuk seluruh sektor. Hal serupa juga ditunjukkan dengan menggunakan Model Efek Tetap dimana LFDI mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap LGDP pada tingkat signifikan 5% dengan intersep yang berbeda antar sektor. Dengan menggunakan Model Efek Acak, variabel LFDI berpengaruh secara signifikan terhadap LGDP di tingkat signifikan 5%. Dari seluruh estimasi model data panel tersebut menunjukkan bahwa variabel LFDI mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel LGDP.

Selanjutnya, untuk mengetahui model mana yang memberikan *performance* paling baik dalam menjelaskan data digunakan Uji Chow atau Uji Likelihood Ratio dan Uji Hausman. Hasil dari uji tersebut menunjukkan bahwa pendekatan FEM menunjukkan *performance* yang lebih baik dalam menjelaskan data dibanding dengan pendekatan PLS dan REM. Dengan demikian untuk melakukan analisis hasil regresi digunakan Model Efek Tetap.

Hasil empiris menggunakan Pendekatan Efek Tetap menunjukkan bukti kuat bahwa PMA mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap GDP pada tingkat signifikansi 5% dimana terlihat bahwa tidak semua subsektor dari PMA tersebut yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari hasil regresi per sektor dengan menggunakan pendekatan Efek Tetap dengan spesifikasi efek menggunakan *cross section fixed effect* ditunjukkan bahwa subsektor Tanaman Pangan dan Perkebunan, Pertambangan, Industri makanan, serta Transportasi, Gudang dan Komunikasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa PMA mempunyai pengaruh signifikan terhadap GDP berasal dari sektor primer, sekunder, dan juga sektor tersier.

## 6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Dalam penelitian ini, masih terdapat beberapa keterbatasan-keterbatasan yaitu penelitian ini hanya meneliti *Gross Operating Balance* sebagai representasi yang menjelaskan penerapan GFS, dalam pengaruhnya terhadap kebijakan fiskal. Demikian pula kebijakan fiskal, hanya direpresentasikan oleh *Debt to GDP Ratio*. Penelitian ini tidak memperhitungkan faktor lain dalam GFS karena keterbatasan data kuantitatif yang telah dikumpulkan.

Hasil pengujian Penerapan GFS dalam penelitian ini memiliki nilai kontribusi sebesar 81,1% yang artinya sisa variasi variabel terikat sebesar 18,9% dijelaskan oleh variabel bebas lain di luar model tersebut karena penulis hanya melibatkan variabel-variabel bebas sesuai dengan hal mendasar yang dapat diberikan oleh laporan GFS yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini. Faktor lain bukan berarti tidak penting, tetapi secara statistik menang diperkirakan hanya memiliki kontribusi yang kecil. Saran untuk

penelitian selanjutnya adalah untuk menggali lebih dalam variable terikat yang mewakili Penerapan GFS, terlebih pada unsur-unsur lain yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

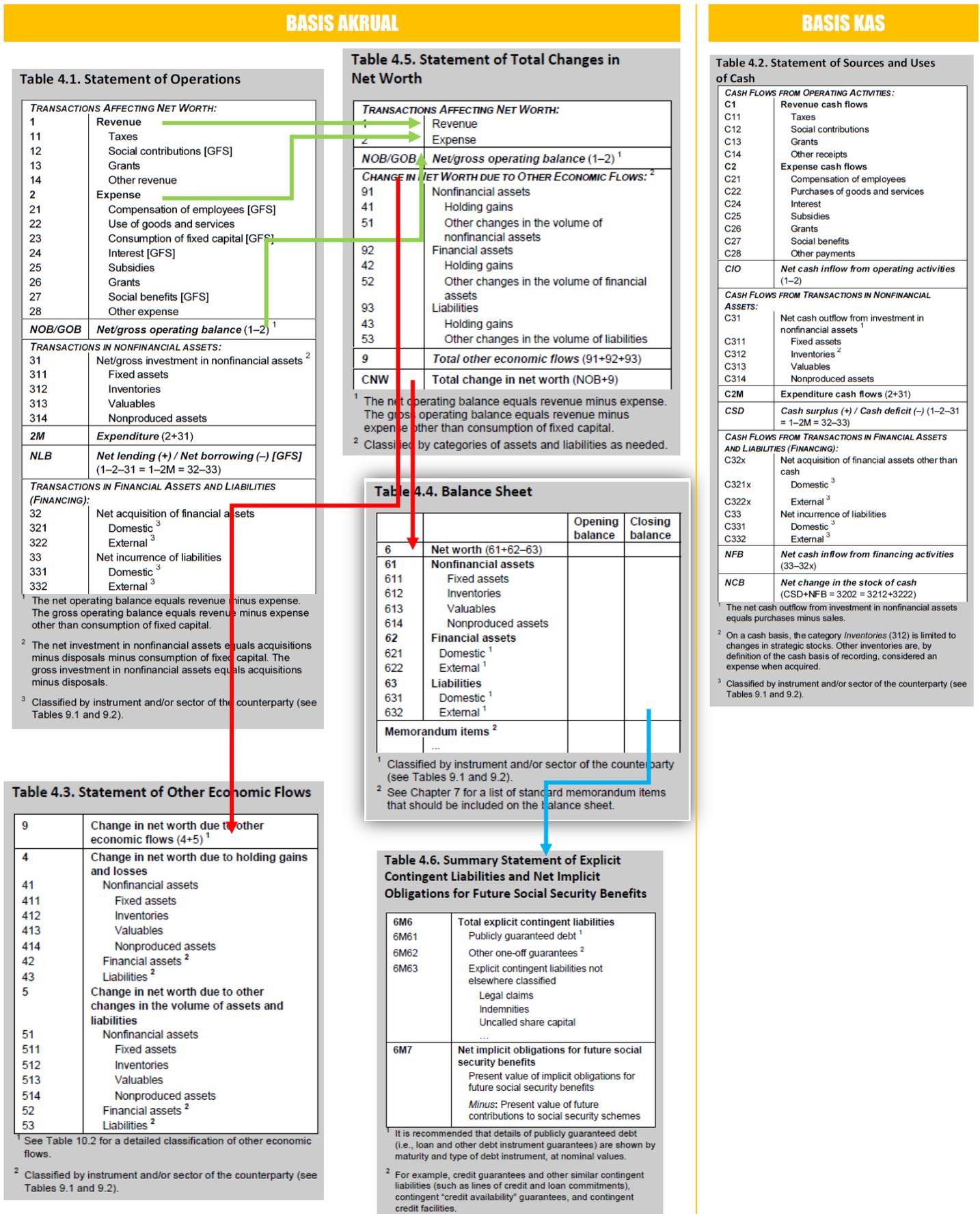
<http://boenkza87frog.blogspot.com/2011/09/kompe-nsasi-dan-kinerja-pegawai-dalam.html>. Diakses pada tanggal 3 Maret 2015.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alink, M. dan Komer, V. 2011. *Handbook on Tax Admsitration*. Amsterdam: IBFD.
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: BP-Universitas Diponegoro.
- International Monetary Fund. 2014. *Government Finance Statistics Manual 2014*.
- Irianto, Agus. 2004. *Statistik: Konsep Dasar, Aplikasi, dan Pengembangannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- John M. Barron, Mark A. Loewenstein, dan Gerald J. Lynch. 1988. *Macroeconomics*. Canada: Addison-Wesley Publishing Company.
- Joseph Ntamatungiro. 2004. *Fiscal Sustainability in Heavily Indebted Countries Dependent on Nonrenewable Resources: The Case of Gabon*. IMF Working Paper. [www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2004/wp0430.pdf](http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2004/wp0430.pdf).
- Manurung, Mandala dan Prathama Rahardja. 2004. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Munawar, Duntji. 2013. *Memahami Pengertian dan Kebijakan Subsidi dalam APBN*. Bandung: Balai Diklat Keuangan Cimahi.
- Nopirin. 2000. *Ekonomi Moneter Buku II. Edisi ke-1 Cetakan Kesepuluh*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Schuler, R.S., dan S.E. Jackson. 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Menghadapi Abad Ke-21*. Jilid 2. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono, 2010. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Yamauchi, Ayumu. 2004. *Fiscal Sustainability : The Case of Eritrea*. IMF Working Paper, No 7, [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org).
- <https://www.gfmag.com/global-data/economic-data/public-debt-percentage-gdp>. Diakses pada tanggal 3 Maret 2015.
- <http://elibrary-data.imf.org/FindDataReports.aspx?d=33061&e=170809>. Diakses pada tanggal 3 Maret 2015.
- [http://www.zakapedia.com/2014/09/pengertian-kebijakan-fiskal-dan.html#\\_](http://www.zakapedia.com/2014/09/pengertian-kebijakan-fiskal-dan.html#_) Diakses pada tanggal 3 Maret 2015.

LAMPIRAN

Gambar 3. Kerangka Laporan Government Finance Statistics



Hasil Uji Asumsi Klasik dengan bantuan Aplikasi SPSS 18

Notes

Output Created		17-Jun-2015 04:46:52
Comments		
Input	Data	E:\prak\Call For Paper\GFS\Call For Paper debt to GDP.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	5
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each test are based on all cases with valid data for the variable(s) used in that test.
Syntax		NPART TESTS /K-S (NORMAL)=RES_1 /MISSING ANALYSIS.
Resources	Processor Time	00:00:00,016
	Elapsed Time	00:00:00,036
	Number of Cases Allowed <sup>a</sup>	196608

a. Based on availability of workspace memory.

[DataSet1] E:\prak\Call For Paper\GFS\Call For Paper debt to GDP.sav

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,59513746
Most Extreme Differences	Absolute	,163
	Positive	,131
	Negative	-,163
Kolmogorov-Smirnov Z		,365
Asymp. Sig. (2-tailed)		,999

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

### Hasil Analisis Regresi dengan bantuan Aplikasi SPSS 18

```
REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT Kebijakan_Fiskal
  /METHOD=ENTER Penerapan_GFS.
```

### Regression

		Notes
Output Created		02-Mar-2015 07:53:58
Comments		
Input	Data	E:\prak\Call For Paper\GFS\Call For Paper debt to GDP.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	5
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on cases with no missing values for any variable used.
Syntax		REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT Kebijakan_Fiskal /METHOD=ENTER Penerapan_GFS.
Resources	Processor Time	00:00:00,031
	Elapsed Time	00:00:00,075
	Memory Required	1380 bytes
	Additional Memory Required for Residual Plots	0 bytes

[DataSet1] E:\prak\Call For Paper\GFS\Call For Paper debt to GDP.sav

#### Variables Entered/Removed<sup>b</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Penerapan_GFS <sup>a</sup>	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Kebijakan\_Fiskal

#### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,926 <sup>a</sup>	,858	,811	,68720554

a. Predictors: (Constant), Penerapan\_GFS

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8,583	1	8,583	18,175	,024 <sup>a</sup>
	Residual	1,417	3	,472		
	Total	10,000	4			

a. Predictors: (Constant), Penerapan\_GFS

b. Dependent Variable: Kebijakan\_Fiskal

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,810	,415		4,358	,022
	Penerapan GFS	-,838	,197	-,926	-4,263	,024

a. Dependent Variable: Kebijakan\_Fiskal